



Laporan Kinerja Tahun 2024

**Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Wilayah
Jawa Bali dan Nusa Tenggara**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban instansi BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang memuat informasi mengenai kinerja Balai sepanjang Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53/M.PAN/2014.

Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritikan dan saran yang membangun, kiranya dapat kami terima sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang akan datang dengan lebih baik lagi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2024 dan diharapkan laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2025
Kepala Balai



Dr. Ardhi Yusuf, S.Hut., M.Agr.
NIP. 19691115 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan	1
1.2. Struktur Organisasi Balai	2
1.3. Sumber Daya Manusia	4
1.4. Isu Strategis 2024	7
1.5. Landasan Hukum	7
1.6. Tujuan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	8
2.2 Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.2 Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	51
DOKUMENTASI	52

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/ Golongan/ Ruang Sampai Akhir Desember 2024	5
2.	Tabel Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.	10
3.	Rincian Usulan Target IKK selama 5 tahun (2020-2024).	12
4.	Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2024	14
5.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kegiatan Penegakan Hukum LHK Tahun 2024.	16
6.	Daftar Kasus Pidana LHK sampai Tahap P.21 Tahun 2024	19
7.	Daftar Hasil Pengawasan Tahun 2024	22
8.	Daftar Hasil Pengawasan berdasarkan Aduan Tahun 2024	26
9.	Daftar Operasi Pengamanan Hutan Tahun 2024	36
10.	Daftar Operasi Peredaran Hasil Hutan (TSL) Tahun 2024	37
11.	Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dengan Tahun 2023	38
12.	Capaian Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	41
13.	Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2024	46

DAFTAR GRAFIK

No	Uraian	Hal
1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Akhir Desember 2024	5
2.	Perbandingan Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024	18
3.	Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ancaman dan gangguan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan berupa perambahan, penebangan liar, perburuan liar, pengambilan liar fauna dan atau flora, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan, kerusakan habitat fauna dan atau flora dilindungi serta kegiatan-kegiatan liar lainnya seperti pencemaran lingkungan, limbah B3 yang mengancam keberfungsian ekosistem beserta dinamika ekologisnya semakin lama semakin tinggi dan masiv. Guna menahan laju tekanan terhadap daya dukung lingkungan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan upaya-upaya preemtif, preventif, represif dan yustisi yang mendukung rencana strategis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024. Sasaran strategis 2020-2024 mengakselerasi capaian sasaran strategis Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara melalui 5 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
2. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana.
4. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

BPPHLHK Wilayah Jabalnusra pada tahun 2024 mendapatkan target pencapaian pada 9 Indikator kinerja kegiatan, yaitu :

1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan sebanyak 15 Operasi.
2. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal sebanyak 15 Operasi.
3. Peningkatan Kapasitas Polisis Kehutanan sebanyak 15 Orang
4. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK sebanyak 124 lembaga/perusahaan.
5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebanyak 2 kasus.
6. Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21 sebanyak 40 Kasus.
7. Layanan Umum sebanyak 1 Paket
8. Layanan Perkantoran sebanyak 1 Paket.

9. Layanan Sarana Internal sebanyak 1 paket

Penjelasan pencapaian pada 9 Indikator kinerja kegiatan, yaitu :

1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan, dapat direalisasikan sebanyak 21 operasi dari target sebanyak 15 operasi atau 140%.
2. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal, dapat direalisasikan sebanyak 18 operasi dari target sebanyak 15 operasi atau 120%.
3. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan, dapat direalisasikan sebanyak 60 orang dari target sebanyak 15 orang atau 400%.
4. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK sebanyak 161 perusahaan dari target sebanyak 124 perusahaan atau 129,84%.
5. Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani, dapat direalisasikan sebanyak 6 kasus dari target sebanyak 2 kasus atau 300%.
6. Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 terealisasi sebanyak 41 Kasus dari target sebanyak 40 Kasus atau 102,50%.
7. Layanan Umum terealisasi sebanyak 1 Paket dari target sebanyak 1 Paket atau 100%.
8. Layanan Perkantoran, terealisasi sebanyak 1 Paket dari target sebanyak 1 Paket atau 100%.
9. Layanan Sarana Internal, terealisasi sebanyak 1 Paket dari target sebanyak 1 Paket atau 100%

Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 sebagian besar memiliki nilai IKK dengan skor di bawah 1, yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023.

Sedangkan untuk capaian efisiensi penggunaan anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024, nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2024 untuk seluruh IKK dengan skor di atas 1; yang berarti penggunaan anggaran tahun 2024 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disingkat BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara memiliki wilayah kerja meliputi 9 (sembilan) Provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kantor Pusat BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berkedudukan di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan Seksi Wilayah I Jakarta dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 9 Jakarta Pusat. Seksi Wilayah II Surabaya dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo, Jawa Timur, dan Seksi Wilayah III Kupang dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jl. Frans Seda No. 14 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT.

BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan eselon III-a, sedangkan seksi wilayah dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan eselon IV/a.

BPPLHK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;

2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
5. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
6. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
7. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
8. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
10. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
12. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

1.2. Struktur Organisasi Balai

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022, BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Seksi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan; inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman; inventarisasi dan identifikasi potensi pelanggaran hukum; sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan terhadap pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya; pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan; pencegahan dan operasi pengamanan hutan; pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup; fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

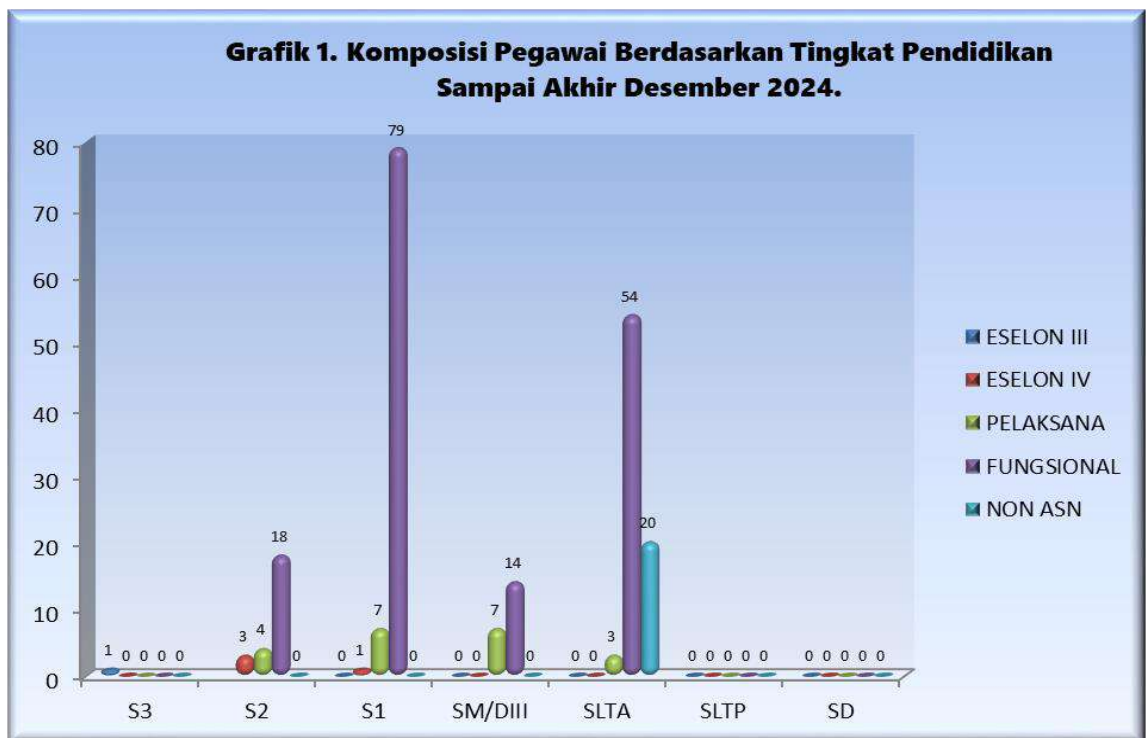
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah pegawai BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara periode sampai akhir Desember 2024 sebanyak 221 orang terdiri dari 192 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), sebanyak 9 orang dengan status PPPK, dan sebanyak 20 orang dengan status tenaga upah/Non ASN. Dilihat dari golongan, sebanyak 17 orang dengan golongan IV, sebanyak 163 orang golongan III, dan golongan II sebanyak 21 orang. Penyebaran pegawai sebanyak 58 orang berkantor di Jakarta-DKI Jakarta, sebanyak 115 orang berkantor di Surabaya-Jawa Timur dan sebanyak 48 orang berkantor di Kupang-NTT. Latar belakang pendidikan pegawai terdiri dari lulusan S3 sebanyak 1 (satu) orang, lulusan S2 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, S1 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) orang, D3 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan SLTA sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, yang terinci menurut jenis kelamin Laki-laki sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang dan Perempuan 37 (tiga puluh tujuh) orang.

Tabel 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/ Golongan/ Ruang Sampai Akhir Desember 2024

NO	JABATAN	GOLONGAN IV					GOLONGAN III					GOLONGAN II					GOLONGAN I					TOTAL	
		e	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a		jml
1	ESELON III	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1
2	ESELON IV	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4
3	PELAKSANA	-	-	-	-	1	1	4	6	5	1	16	1	4	0	0	5	-	-	-	-	-	22
4	FUNGSIONAL																						
a.	POLHUT	-	-	1	3	4	8	24	31	23	18	96	4	3	3	5	15	-	-	-	-	-	119
b.	PPLH	-	-	-	2	2	4	8	7	21	2	38	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	42
c.	Analisis PK APBN	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1
d.	Pengelola PBJ	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1
e.	Pranata Komputer	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
5	FUNGSIONAL PPPK																						
a.	Perencana	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2
b.	Pranata Humas	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1
c.	Arsiparis	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2
d.	Analisis SDM Aparatur	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1
e.	Pengendali Dampak Lingku	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	0	0	1	6	11	18	37	44	49	32	162	5	8	3	5	21	0	0	0	0	0	201



Penyebaran pegawai pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebagai berikut :

a. Seksi Wilayah I Jakarta

Pegawai yang berkedudukan di Seksi Wilayah I Jakarta sampai akhir Desember 2024 sebanyak 58 orang pegawai. Terbagi dalam 2 lokasi, yaitu Jakarta dan Bandung

b. Seksi Wilayah II Surabaya

Pegawai yang ditempatkan di Seksi Wilayah II Surabaya sebanyak 68 orang, namun terbagi dalam 3 lokasi yaitu di Yogyakarta, Semarang dan Surabaya

c. Seksi Wilayah III Kupang

Pegawai yang ditempatkan di Seksi Wilayah III Kupang sebanyak 48 orang, dengan kedudukan di Kota Mataram, Labuan Bajo, Denpasar dan Kota Kupang.

d. Tata Usaha

Pegawai yang berkedudukan di Sub Bagian Tata Usaha Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebanyak 47 orang.

1.4. Sarana dan Prasarana

Pada akhir tahun 2024, rincian sarana dan prasarana yang telah dimiliki BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebagaimana Lampiran 1.

Total nilai Barang Milik Negara pada BPPLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai akhir Desember 2024 adalah sebesar Rp. 57.006.588.771,- yaitu terdiri dari Tanah Bangunan Kantor sebesar Rp. 10.532.438.000, peralatan dan mesin sebesar Rp. 38.393.601.637,- Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 7.695.606.788,- Irigasi sebesar Rp. 110.102.000,- , Jaringan sebesar Rp. 44.848.000,- dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan sebesar Rp. 229.992.346,-

1.5. Isu Strategis 2024

Isu strategis yang muncul dan diharapkan dapat ditangani terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2024 adalah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani melalui Penegakan Hukum.

Isu strategis lainnya terkait dengan kerawanan lingkungan hidup di Destinasi Prioritas Labuan Bajo, sehingga sedang dibangun Kantor Pusat Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

1.6. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, adalah :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.7. Tujuan

Laporan Kinerja BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara 2024 disusun dengan tujuan :

- a. Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- b. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (selanjutnya disingkat dengan RPJMN 2020-2024) telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut ditegaskan kembali bahwa RPJMN merupakan arahan bagi seluruh kementerian dalam penyusunan rencana strategisnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti.

RPJMN 2020-2024 menjadi dasar penetapan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Tujuan Kementerian LHK diwujudkan oleh seluruh unit-unit kerjanya melalui pencapaian serangkaian sasaran, secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi. Adapun penentuan sasaran-sasaran termaksud di atas dilakukan dalam bingkai ranah tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, dengan mengacu pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024, serta dengan strategi yang didasarkan pada potensi dan permasalahan. Sedangkan pengertian "sasaran" dalam dokumen ini mengacu pada pedoman penyusunan Renstra di jajaran Kementerian LHK.

Sasaran adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian dan unit-unit kerjanya secara berantai dan berjenjang. Sasaran Strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan

- kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian LHK 2020- 2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dari gabungan beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di dalam lingkungannya. Berdasarkan hal itu, Kementerian LHK menetapkan sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis Kementerian LHK yang diturunkan langsung terhadap Ditjen Gakkum LHK adalah sasaran strategis ke-empat, yaitu "Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing". Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Ditjen Gakkum LHK adalah IKU 14 yakni "Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani melalui Penegakan Hukum" dan IKU 18 yaitu "Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK" yang berlaku kepada

semua kegiatan Dukungan Manajemen. Meski demikian, secara tidak langsung Ditjen Gakkum LHK turut berkontribusi terhadap IKU dan Sasaran Strategis lainnya.

Sasaran Strategis Ditjen Gakkum LHK adalah sebagai berikut:

- a. Teramankannya lingkungan hidup dan kehutanan dari gangguan dan ancaman;
- b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. terselesaikannya penanganan kasus dan/atau perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang responsif, berpelayanan prima dan akuntabel.

Program Prioritas Ditjen Gakkum LHK antara lain Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam mencapai Program Prioritas tersebut dapat digambarkan dari tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Tabel Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKP/IKK)
Program 029.WA : Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen Gakkum
Kegiatan 5427 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKP/IKK)
		Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program 029.FF : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
	Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman
Kegiatan 5428 : Pencegahan dan Pengamanan Hutan		
	Telaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar
Program 029.FD : Kualitas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan
	Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani
Kegiatan 5429 : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		
	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKP/IKK)
Kegiatan 5430 : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		
	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Kegiatan 5431 : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap
	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya

Adapun kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam mendukung tercapainya Program Prioritas Ditjen Gakkum LHK Tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen PHLHK, output kegiatannya antara lain:
 - Layanan dukungan manajemen UPT
 - Layanan perkantoran
- b. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan, output kegiatannya antara lain:
 - Jumlah operasi pengamanan hutan
 - Jumlah operasi peredaran hasil hutan
 - Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya
- c. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, output kegiatannya antara lain:
 - Peningkatan Kapasitas PPLH
 - Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang ditangani

- Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani
- d. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, output kegiatannya antara lain:
 - Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21
 - Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya

Berdasarkan penjabaran di atas, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Bali Nusa Tenggara menyusun rencana target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Rincian Usulan Target IKK selama 5 tahun (2020-2024).

No	Indikator Kinerja Kegiatan (Satuan)	Target Capaian IKK (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Layanan dukungan manajemen UPT (Layanan)	1	1	1	1	1
2	Layanan perkantoran (Layanan)	1	1	1	1	1
3	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan (Operasi)	11	14	16	18	20
4	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan (Operasi)	21	47	56	71	75
5	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	105	109	112	116
6	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani (Perusahaan)	170	255	288	331	357
7	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani terkait DAS Citarum (Perusahaan)	40	66	76	87	92
8	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Kasus)	24	38	44	49	59
9	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	4	5	5	8	8

2.2 Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa dalam satu eselon 1 pada Kementerian/Lembaga bertanggung jawab terhadap 1 (satu) program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa program yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum adalah Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum wajib menjalankan program dimaksud. Hal tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan perubahannya antara Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Kepala BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum tahun 2020-2024 salah satunya adalah indikator kinerja kegiatan yang dimandatkan kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2024 sebagaimana tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2024
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan Perkantoran)	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT (Layanan Umum)	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan terhadap gangguan dan ancaman di 34 Provinsi.	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	15 Operasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2024 AWAL
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	15 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisis Kehutanan	15 orang
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	124 Perusahaan
4.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	2 Kasus
5.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	40 Kasus

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

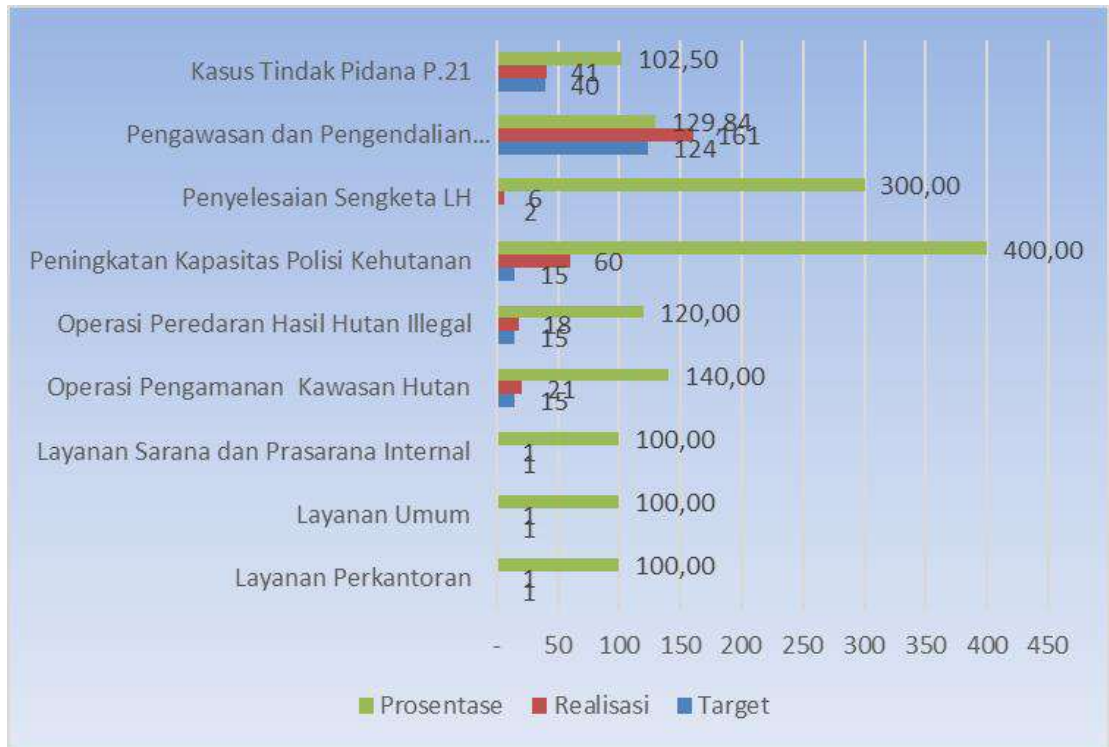
Capaian kinerja BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2024 sebagaimana terinci dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kegiatan Penegakan Hukum LHK Tahun 2024.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	15 Operasi	21 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	15 Operasi	18 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	60 Orang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	124 Perusahaan	161 Perusahaan
4.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	2 Kasus	6 Kasus
5.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	40 Kasus	41 Kasus

Grafik 2. Perbandingan Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja dari 11 (sebelas) indikator kinerja tahun 2024 yaitu:

- A. Layanan Perkantoran, yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor dapat dilaksanakan selama 12 bulan atau 100 %.
- B. Layanan umum, yang meliputi penyusunan rencana program anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian, dapat dilaksanakan selama 12 bulan atau 100 %.
- C. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, yang meliputi Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi serta Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, dapat dilaksanakan semuanya atau 100%.
- D. Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21 terealisasi 41 kasus dari target sebanyak 40 kasus atau 102,50%, dengan perincian :

Tabel 6. Daftar Kasus Pidana LHK sampai Tahap P.21 Tahun 2024.

NO.	TIPOLOGI KASUS	LOKASI				TERSANGKA	P.21
		DESA	KEC.	KAB./KOTA	PROV.		
1	Illegal Logging	Desa Mata Wae	Sano Nggoang	Manggarai Barat	NTT	1. ABDULAH, 2. DOROTEUS JEMINTA, 3. ENDANG NURDIN, 4. ALI RENO	B-22/N.3.24/Eku.1/01/2024; 03 Januari 2024
2	Illegal Logging	Desa Mata Wae	Sano Nggoang	Manggarai Barat	NTT	MOHAMAD JONAFAN	B-23/N.3.24/Eku.1/01/2024; 03 Januari 2024
3	Illegal Logging	Arjasa	Arjasa	Situbondo	Jawa Timur	Robert Dian Ghazali bin (alm) Ghazali dan Wahedi bin Suliman	B-405/M.5.4/Eku.1/1/2024; 17 Januari 2024
4	TSL	Dusun Karangkeboh RT/RW 001/004	Banaran	Boyolali	Jawa Tengah	Ali Abdul Rohman bin Sutrisno	B-503/M.3.4/Eku.1/01/2024; 30 Januari 2024
5	Illegal Logging	Oefeto	Amabi	Kupang	NTT	SEM WELKIS dan ABSALOM TEFI	B-415/N.3/Eku.1/02/2024 ; 5 Februari 2024
6	Illegal Logging	Bajulmati	Wongsorejo	Banyuwangi	Jawa Timur	Fathor Rozi	B-1086/M.5.4/Eku.1/2/2024; 12 Februari 2024
7	Perambahan	Blok Gunung Kundi	-	Probolinggo	Jawa Timur	Subur (Alm) Nawa'i	B-2511X/M.5.4/Eku.1/5/2024; Tanggal 7 Mei 2024
8	Illegal Logging	Cikalong	Sidamulih	Pangandaran	Jawa Barat	Muhamad Ijudin Rahmat	B-2652/M.2.4/Eku.1/05/2024; Tanggal 8 Mei 2024
9	Pembalakan Liar	Sori Tatanga	Pekat	Dompus	NTB	ABDUL GAFUR	B-1387/N.2.4/Eku.1/05/2024; Tanggal 16 Mei 2024
10	Kawasan Konservasi	Karimunjawa	Karimunjawa	Jepara	Jawa Tengah	Mirah Sanusi Darwiyah	B-2430/M.3.4/Eku.1/06/2024; Tanggal 03 Juni 2024
11	Kawasan Konservasi	Karimunjawa	Karimunjawa	Jepara	Jawa Tengah	Sutrisno	B-2431/M.3.4/Eku.1/06/2024; Tanggal 03 Juni 2024
12	Kawasan Konservasi	Karimunjawa	Karimunjawa	Jepara	Jawa Tengah	Teguh Santoso	B-2433/M.3.4/Eku.1/06/2024; Tanggal 03 Juni 2024
13	Kawasan Konservasi	Kemojang	Karimunjawa	Jepara	Jawa Tengah	Sugiyanto Limanto	B-2587/M.3.4/Eku.1/06/2024; Tanggal 07 Juni 2024
14	TSL	Pondok Kaso Tengah	Cidahu	Sukabumi	Jawa Barat	Asep Sudirman bin Asep	B-883/M.2.30/Eku.1/06/2024; 10 Juni 2024
15	Illegal Logging	Sambori	Lambitu	Bima	NTB	Muhamad Ali alias Ama Muji	B-1910/N.2.4/Eku.1/07/2024; 02 Juli 2024

NO.	TIPOLOGI KASUS	LOKASI				TERSANGKA	P.21
		DESA	KEC.	KAB./KOTA	PROV.		
16	Illegal Logging	Tarlawi	Wawo	Bima	NTB	Ardansyah	B-1924/N.2.4/Eku.1/07/2024 Tanggal 1 Juli 2024
17	Illegal Logging	Mataiyang	Brang Ene	Sumbawa Barat	NTB	Darwin	B-2171/N.2.4/Eku.1/7/2024; tanggal 23 Juli 2024
18	Illegal Logging	Mataiyang	Brang Ene	Sumbawa Barat	NTB	Suhar dan Jaya Putra	B-2169/N.2.4/Eku.1/7/2024; tanggal 23 Juli 2024
19	Illegal Logging	Jl. Timor Raya, Kec. Kupang	Kupang Timur	Kupang	NTT	Joshua Anang bin Edward Cristian Anang (alm)	B-2285/N.3.1/Eku.1/08/2024; Tanggal 07 Agustus 2024
20	Limbah B3	Leuwilimus	Cikande	Serang	Banten	PT. XIANG WANG INDONESIA	B-2380/M.6.10/Eku.1/08/2024; Tanggal 7 Agustus 2024
21	TSL	Jatibening	Pondok Gede	Bekasi	Jawa Barat	ILHAM TORIQ KANURUAN.	B-4892/M.2.17/Eku.1/08/2024; Tanggal 5 Agustus 2024
22	TSL	Dusun Sugih Waras RT	Bejen	Temanggung	Jawa Tengah	Masyhudi bin (Alm) H. Sofyan	B-1212/M.3.37/Eku.1/8/2024 Tanggal 7 Agustus 2024
23	Limbah B3	Warung Banten	Cibeber	Lebak	Banten	PT. Samudera Banten Jaya	B-2334/M.6.4/Eku.1/08/2024; Tanggal 08 Agustus 2024
24	TSL	Bandara Eltari		Belu	NTT	Fatkur Rohman	B-2399/N.3.1/Eku.1/8/2024; Tanggal 14 Agustus 2024
25	Illegal Logging	-	-	Jember	Jawa Timur	Suparno bin Suparman	B-4704/M.5.4/Eku.1/8/2024 Tanggal 14 Agustus 2024
26	illegal Logging	-	Pelabuhan Tanjung Perak	Surabaya	Jawa Timur	Irsandi (bin) Mbo Awe	B-4880/M.5.4/Eku.1/08/2024; tanggal 21 Agustus 2024
27	TSL	Kawasan Taman Nasional	Aikmel	Lombok Timur	NTB	M. Nur Rahman	B-2609/N.2.4/Eku.1/08/2014; Tanggal 28 Agustus 2024
28	Penambahan	Tamansari	Tamansari	Bogor	Jawa Barat	H.ENDANG ALIAS BEDONG	B-3318/M.2.18/Eku.1/09/2024; 18 September 2024
29	Illegal Logging	Cikalong	Sidamuleh	Pangandaran	Jawa Barat	SACA BIN OTANG	B-1988/M.2.25/Eku.1/09/2024; Tanggal 26 September 2024
30	illegal Logging	Dusun Rajurejo RT.03	Banyuputih	Situbondo	Jawa Timur	Junaidi bin Misnawi, dkk	B/5736/M.5.4/Eku.1/9/2024; Tanggal 23 September 2024
31	Illegal Logging	Baka Jaya	Koja	Dompu	NTB	M. Amin dan Haris	B-3042/N.2.4/Eku.1/10/2024; Tanggal 08 Oktober 2024
32	Limbah B3	Warung Banten,	Cibeber,	Lebak	Banten	Muhammad Alwi Djufri (Perorangan).	B-3210/M.6.4/Eku.1/10/2024; Tanggal 08 Oktober 2024

NO.	TIPOLOGI KASUS	LOKASI				TERSANGKA	P.21
		DESA	KEC.	KAB./KOTA	PROV.		
33	Limbah B3	Warung Banten	Cibeber	Lebak	Banten	EBNU SAMSUDIN BIN DULSAID	B-3215/M.6.4/Eku.1/10/2024; tanggal 08 Oktober 2024
34	TSL			Manggarai Barat	NTT	Petrus Gani	B-3233/N.3.4/Eku.1/10/2024; Tanggal 15 Oktober 2024
35	Illegal Logging	Sesaot,	Narmada	ombok Barat	NTB	M. Putradi	B-3110/N.2.4/Eku.1/10/2024; Tanggal 21 Oktober 2024
36	Illegal Logging	Sesaot,	Narmada	ombok Barat	NTB	Sudihardi	B-3111/N.2.4/Eku.1/10/2024; Tanggal 21 Oktober 2024
37	Illegal Logging	Sesaot,	Narmada	ombok Barat	NTB	Sediarsip	B-3110/N.2.4/Eku.1/10/2024; Tanggal 21 Oktober 2024
38	Perambah an	Tahura R. Soeryo	Prigen	Pasuruan	Jawa Timur	Syamsul Arifin	B-6480/M.5.4/Eku.1/10/2024; Tanggal 18 Oktober 2024
39	TSL	Dusun Krajan I RT 001RW	Tempurrejo	Jember	Jawa Timur	Subairi bin (Alm) Subahir	B-7260/M.5.4/Eku.1/11/2024; Tanggal 25 Nopember 2024
40	Illegal Logging	Sumberwatu	Banyuputih	Situbondo	Jawa Timur	Montahe bin (Alm) Mahyang alias P Har	B-7369A/M.5.4/Eku.1/12/2024; Tanggal 27 Nopember 2024
41	TSL	TN Tambora, Resort	Pekat	Dompu	NTB	1.Ahmat.A Bakar M 2.Mayor Hasan 3.Jubaidin	B-3868/N.2.4/Eku.1/12/2024; Tanggal 19 Desember 2024

- E. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK sebanyak 161 lembaga/perusahaan dari target sebanyak 124 lembaga/perusahaan atau 129,84%, dengan rincian sebanyak 61 izin dari pengawasan, dan sebanyak 100 lembaga/perusahaan dari penanganan pengaduan perusahaan sebagaimana tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Daftar Hasil Pengawasan Tahun 2024.

No	Nama Perusahaan	Kab/Kota	Provinsi	Jenis Industri	Pelaksanaan	Hasil
1	PT Agro Wahana Bumi	Kab. Bima	NTB	Industri Kehutanan	23-27 April 2024	Tidak Taat
2	PT Pismatex Textile Industry	Kab. Pekalongan	Jawa Tengah	Industri Tekstil	23-27 April 2024	Tidak Taat
3	PT Nipsea Paint & Chemicals	Kab. Purwakarta	Jawa Barat	Industri Kimia	14-17 Mei 2024	Tidak Taat
4	PT Jiale Indonesia Textile	Kab. Jepara	Jawa Tengah	Industri Tekstil	14-17 Mei 2024	Tidak Taat
5	PT Prima Paper Indonesia	Kab. Wonogiri	Jawa Tengah	Industri Kertas	14-17 Mei 2024	Tidak Taat
6	PT Inoac Polytechno	Kab. Tangerang	Banten	Industri Komponen Otomotif	14-17 Mei 2024	Tidak Taat
7	PT EDS Manufacturing Indonesia	Kab. Tangerang	Banten	Industri Komponen Otomotif	14-17 Mei 2024	Tidak Taat
8	PT Mitrapak Eramandiri	Kota Surabaya	Jawa Timur	Industri Kertas	28-31 Mei 2024	Tidak Taat
9	PT Alko Mandiri	Kab. Tangerang	Banten	Pengolahan Logam	28-31 Mei 2024	Tidak Taat
10	PT Bentara Sinar Prima	Kab. Bandung	Jawa Barat	Industri Tekstil	28-31 Mei 2024	Tidak Taat
11	PT Bitratex Industries	Kota Semarang	Jawa Tengah	Industri Tekstil	18-22 Juni 2024	Tidak Taat
12	PT Candratex Sejati	Kab. Bandung	Jawa Barat	Industri Tekstil	25-29 Juni 2024	Tidak Taat
13	PT Adhi Mitra Dinamika	Kota Bandung	Jawa Barat	Industri Tekstil	25-29 Juni 2024	Tidak Taat
14	PT Indo Hasasi Textiles	Kab. Bandung	Jawa Barat	Industri Tekstil	25-29 Juni 2024	Tidak Taat

No	Nama Perusahaan	Kab/Kota	Provinsi	Jenis Industri	Pelaksanaan	Hasil
15	PT Enggal Subur Kertas	Kab. Kudus	Jawa Tengah	Industri Kertas	25-29 Juni 2024	Tidak Taat
16	PT Sukuntex	Kab. Kudus	Jawa Tengah	Industri Tekstil	25-29 Juni 2024	Tidak Taat
17	PT Lion Metal Works, Tbk	Kab. Purwakarta	Jawa Barat	Industri Pabrikasi Baja	2-6 Juli 2024	Tidak Taat
18	PT Gunung Tua Mandiri	Kab. Bogor	Jawa Barat	Tambang Mineral	2-6 Juli 2024	Tidak Taat
19	PT Daya Manunggal Tekstil	Kab. Salatiga	Jawa Tengah	Industri Tekstil	2-6 Juli 2024	Tidak Taat
20	PT Tiga Manunggal Syntetic	Kab. Salatiga	Jawa Tengah	Industri Tekstil	9-13 Juli 2024	Taat/Telah Berhenti Beroperasi
21	PT Kemilau Warna Ceria	Kab. Sragen	Jawa Tengah	Industri Tekstil	9-13 Juli 2024	Tidak Taat
22	PT Condong Garut	Kab. Garut	Jawa Barat	Perkebunan Sawit	9-13 Juli 2024	Tidak Taat
23	PT Hiruta Kogyo Indonesia	Kab. Karawang	Jawa Barat	Industri Otomotif	9-13 Juli 2024	Tidak Taat
24	PT Primissima	Kab. Sleman	DIY	Industri Tekstil	16-20 Juli 2024	Tidak Taat/Telah Berhenti
25	PT Pesona Indonesia Plywood	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	Industri Kayu Lapis	16-20 Juli 2024	Tidak Taat
26	PT Putera Mulya Terang Indah	Kab. Bandung	Jawa Barat	Industri Tekstil	16-20 Juli 2024	Tidak Taat
27	PT Senotexindo Jaya Lestari	Kab. Bandung	Jawa Barat	Industri Tekstil	16-20 Juli 2024	Tidak Taat
28	PT Sinar Sari Sejati	Kab. Bandung	Jawa Barat	Industri Tekstil	23-27 Juli 2024	Tidak Taat
29	PT Hanil Indonesia	Kab. Boyolali	Jawa Tengah	Industri Tekstil	23-27 Juli 2024	Tidak Taat
30	PT Sunsilon Utama	Kab. Sumedang	Jawa Barat	Industri Tekstil	23-27 Juli 2024	Tidak Taat

No	Nama Perusahaan	Kab/Kota	Provinsi	Jenis Industri	Pelaksanaan	Hasil
31	PT Shinta Woo Sung	Kab. Serang	Banten	Industri Tekstil	6-10 Agustus 2024	Tidak Taat
32	PT Garut Makmur Perkasa	Kab. Garut	Jawa Barat	Industri Penyamakan Kulit	6-10 Agustus 2024	Tidak Taat
33	PT Bintangmas Cahaya Internasional	Kab. Serang	Banten	Industri Pengelolaan Limbah B3	6-10 Agustus 2024	Taat
34	PT Novatex	Kab. Bandung	Jawa Barat	Industri Tekstil	20-24 Agustus 2024	Tidak Taat
35	PT Avia Avian	Kab. Serang	Banten	Industri Kimia	17-21 September 2024	Tidak Taat
36	PT KSS Indo Apparel	Kab. Magetan	Jawa Timur	Industri Tekstil	9-13 September 2024	Tidak Taat
37	PT Ebara Indonesia	Kab. Depok	Jawa Barat	Industri Pompa Air	30 September-4 Oktober 2024	Tidak Taat
38	PT SCG Readymix Indonesia	Kota Surabaya	Jawa Timur	Beton Cair Siap Pakai	1-3 April 2024	Telah Berhenti Beroperasi
39	PT Peroni Karya Sentra	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Industri Logam	1-3 April 2024	Taat SA
40	PT Wahana Lestari Bersatu	Kota Surabaya	Jawa Timur	Pengelola Limbah B3	1-3 April 2024	Tidak Taat SA
41	PT Kencana Unggul Sukses	Kota Administratif Jakarta	DKI Jakarta	Pengelola Hunian	1-3 April 2024	Tidak Taat SA
42	PT Kunci Emas Sejahtera	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Pengelola Limbah B3	1-3 April 2024	Tidak Taat SA
43	PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa	Kab. Jember	Jawa Timur	Industri Semen	24-26 April 2024	Telah Berhenti Beroperasi
44	PT Natatex Prima	Kab. Sumedang	Jawa Barat	Industri Tekstil	23-25 April 2024	Tidak Taat SA

No	Nama Perusahaan	Kab/Kota	Provinsi	Jenis Industri	Pelaksanaan	Hasil
45	PT Fajar Mataram Sedayu	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	Industri Coklat	23-25 April 2024	Tidak Taat SA
46	CV Artha Abadi	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Industri Pembuatan Tempat Telur	24-26 April 2024	Telah Berhenti Beroperasi
47	PT Central Light Concrete	Kab. Gresik	Jawa Timur	Industri Beton	6-8 Mei 2024	Telah Berhenti Beroperasi
48	PT Karya Wira Beton Ready Mix	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	Industri Beton Siap Pakai	6-8 Mei 2024	Telah Berhenti Beroperasi
49	PT Mirolam Adi Gunawan	Kab. Jombang	Jawa Timur	Industri Kertas Budaya	6-8 Mei 2024	Telah Berhenti Beroperasi
50	PT Kertas Basuki Rachmat	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	Industri Kertas	6-8 Mei 2024	Telah Berhenti Beroperasi
51	PT Surya Beton Indonesia Plant Mojosari	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Industri Readymix Beton	6-8 Mei 2024	Telah Berhenti Beroperasi
52	PT Sumber Makmur Kedungsari	Kab. Jombang	Jawa Timur	Peleburan Aluminium	19-21 Juni 2024	Taat SA
53	PT Artha Teguh Gemilang	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Industri Usaha Corrugated	26-28 Juni 2024	Taat SA
54	PT Blambangan Foodpackers Indonesia / PT	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	Industri Pengolahan Ikan	13-16 Agustus 2024	Tidak Taat SA/Telah Berhenti
55	PT Affinity Health Indonesia (Rumah Sakit)	Kota Tangerang Selatan	Banten	Rumah Sakit	17-20 September 2024	Tidak Taat SA
56	PT Usahatani Lestari	Kab. Bima	Nusa Tenggara Barat	Hutan Tanaman Industri	10-14 September 2024	Tidak Taat SA
57	PT Agung Raya Perkasa Sejahtera	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	Industri Kapur	9-11 Oktober 2024	Taat SA/Telah Berhenti
58	PT Coca Cola Indonesia	Kota Depok	Jawa Barat	Industri Minuman Ringan	23-25 Oktober 2024	Taat SA
59	TPK Sarimukti	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	Tempat Pengolahan Sampah	14-16 November 2024	Tidak Taat SA
60	PT HLI Green Power	Kab. Karawang	Jawa Barat	Industri Baterai	6-8 November 2024	Taat SA
61	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Region	Kota Tegal	Jawa Tengah	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan	5-8 November 2024	Tidak Taat SA

Tabel 8. Daftar Hasil Pengawasan berdasarkan Aduan Tahun 2024.

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
1	230081	PT Tiga Sedulur Sakti	Purwakarta	Jawa Barat	Diduga PT Tiga Sedulur Sakti melakukan pertambangan pasir dalam kawasan hutan sejak Agustus 2022 (peta terlampir). Diduga terjadi penyerobotan kawasan hutan oleh PT Tiga Sedulur Sakti di wilayah kerja KPH Purwakarta
2	230352	PT Manna Jaya Makmur	Mojokerto	Jawa Timur	Penambangan galian C (tanah dan kerikil/ batu) oleh Sdr. Poniman dan Sdr. Jalal di lahan pertanian yang berlokasi di Dusun Sawoan Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang diduga tidak atau belum memiliki izin pertambangan dan izin lingkungan
3	230385	PT Berdikari Jaya Bersama	Probolinggo	Jawa Timur	Dugaan terjadinya pencemaran udara berupa bau menyengat dan debu dari kegiatan PT Berdikari Jaya Bersama
4	230464	PT Sukses Mandiri Berkah	Batang	Jawa Tengah	Dugaan adanya kegiatan pengurukan dan pemadatan lahan tanpa izin di Pantai Sigandu Ujung Negro. Pengadu melaporkan kegiatan tersebut karena diduga illegal tanpa melengkapi dokumen perijinan.
5	230599	Rudi dan Kawan kawan	Tangerang	Banten	Bahwa kami meminta Kepada Ditjen Gakkum KLHK untuk segera melakukan tindakan secara hukum terhadap pelaku pengusaha peleburan almunium ilegal di kampung ranca balok Desa Cukanggalih, RT.007/006. Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang agar tanah dilokasi tersebut tidak tercemar akibat limbah B3 jenis debu almunium bekas pembakaran.
6	230703	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Pandeglang	Banten	Dugaan adanya kapal togkang dan tugboat terdampar di perairan Pulau Panaitan Ujung Kulon
7	230765	PT Wistara International Maritim	Pandeglang	Banten	Pada tanggal 7 Oktober 2023 tepatnya pukul 21:30 WIB Masyarakat Desa Citeureup melapor ada sinyal SOS dari arah pulau Liwungan kepada anggota YKSS, setelah itu pihak YKSS memberitahukan kepada Satpolairud kejadian tersebut. Pihak Satpolairud mengkonfirmasi bahwa sinyal SOS tersebut adalah karamnya kapal tongkang bermuatan batubara dengan nama TB. Kayu Manis XX dengan pemilik tongkang adalah PT. Wistara International Maritim. Posisi kapal tongkang tersebut sekarang sudah miring dan sudah ada batubaranya yang tumpah ke laut. Evakuasi kapal dilakukan oleh pemilik kapal tongkang namun prosedurnya menurut kami salah karena yang melakukan evakuasi adalah dari pihak pemilik moring bukan dari perusahaan salvage. sampai saat ini posisi kapal sangat mengganggu tempat konservasi terumbu karang kami dan mengawatirkan pengunjung wisata dan nelayan.

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
8	230789	Bbws Citarum Situ Bayongbong	Bandung	Jawa Barat	Setelah adanya proyek ini kualitas air jadi keruh sehingga tidak layak konsumsi dan adanya pihak pribadi yang memanfaatkan untuk sendiri tanpa ijin kelola dari pihak pemerintah.
9	230820	PT Surya Logam Inti Murni	Tangerang	Banten	PT Surya Logam Inti Murni diduga tidak memiliki UKL-UPL serta tidak memiliki surat kelayakan operasional (SLO) sebagai perusahaan di bidang peleburan logam/aluminium.
10	230842	PT Mitra Sinar Jaya bekerja sama dengan Saudara Sabinus Leba	Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	UPT KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo bersama staf PLN menemukan adanya pembuatan kandang ayam dalam kawasan hutan secara ilegal yang diduga milik Saudara Sabinus Leba yang bekerja sama dengan PT Mitra Sinar Jaya . Aktivitas tersebut telah diberikan Teguran Tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Saudara Sabinus Leba dengan tembusan PT Mitra Sinar Jaya untuk menghentikan aktivitas lapangan sampai dengan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan selesai. Dari hasil pemantauan lapangan hingga tanggal 3 Juli 2023 aktivitas tersebut masih dilakukan tanpa mengurus dokumen kelengkapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
11	230911	PT Long Xing Logam Indonesia	Gresik	Jawa Timur	Dugaan pencemaran air Kali Afvour Jalan Raya Wringinanom KM.34, Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik
12	230931	PT Wahyu Daya Mulia	Jombang	Jawa Timur	Dugaan kegiatan PT Wahyu Daya Mulia menimbulkan pencemaran udara berupa debu yang mengakibatkan mata perih, sesak nafas dan iritasi
13	230938	Taman Wisata Satwa dan Peternakan Sato Loka	Sleman	Yogyakarta	Dugaan adanya satwa liar dilindungi yang dimiliki oleh Taman Wisata Satwa dan Peternakan Sato Loka di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.
14	230955	PT Sentral Multikon Indi (PT SMI)	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Berdasarkan informasi pada laman BERITAJARTIMUR.COM (Labuan Bajo-MABAR), terdapat aktivitas tambang Galian C milik PT Sentral Multikon Indi (PT SMI) di wilayah Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang diprotes warga sekitar diduga melakukan pencemaran lingkungan. Salah satunya, air bercampur lumpur telah mencemari sungai Wae Mese Tiwu Nampar. Sungai yang menjadi sumber air kebutuhan Warga di dua desa dan lima anak kampung. Dua desa tersebut yaitu Desa Tiwu Nampar dengan tiga anak kampung yakni Kampung Mejer, Kampung Mbuhung dan Lambur. Sedangkan, desa Warloka dengan anak kampung Kenari dan Kampung Cumbi. Akibat aktivitas PT.SMI sekarang ini warga tidak lagi menggunakan air sungai Wae
15	240045	Kepala Cabang PLN UP3 Karawang Imam Ahmad	Karawang	Jawa Barat	Memasukan Listrik Kedalam Kawasan Hutan tanpa adanya izin dari kementerian terkait, lokasi tersebut indikasi bangunan ilegal yang berada dalam kawasan hutan dengan pemilik seorang pengusaha

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
16	240067	CV Jogja Gimali Exotama	Sleman	Yogyakarta	Dugaan kepemilikan satwa liar dilindungi tanpa izin oleh Jogja Exotarium
17	240144	PT Gemilang Limpah Internusa	Pacitan	Jawa Timur	Masyarakat Desa Cokrokembang, Kec. Ngadirejo, Kab. Pacitan melakukan pengaduan ke Pemkab Pacitan terkait pencemaran dan atau kerusakan tanah atau lahan pertanian yang rusak dampak pencemaran limbah dari kegiatan tambang PT GLI
18	240168	PT Gemilang Limpah Internusa	Pacitan	Jawa Timur	Menindaklanjuti surat dari Masyarakat Desa Cokrokembang Nomor: 612/408.71.04/2023 tanggal 21 Desember 2024 terkait aduan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan yang diduga akibat kegiatan pertambangan PT Gemilang Limpah Internusa yang berlokasi di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, maka bersama ini kami sampaikan beberapa tuntutan yang disampaikan masyarakat sbb: 1. Sebelum pengelolaan limbah dilakukan dengan benar dan masih menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat Desa Cokrokembang, masyarakat meminta proses penambangan dari PT GLI dihentikan; 2. Dilakukan pemulihan kondisi tanah/lahan pertanian yang rusak akibat dampak pencemaran dari limbah kegiatan penambangan PT GLI
19	240182	CV Utomo Plastik	Sidoarjo	Jawa Timur	Dugaan CV Utomo Plastik melakukan pembuangan air limbah tanpa pengolahan, cerobong asap hitam dan berbau, tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan melakukan pembakaran limbah padat di belakang lokasi kegiatan.
20	240193	Candra Soehartawan	Ngawi	Jawa Timur	Faktor faktor kesalahan bupati Ngawi dan perhutani dalam mengambil kebijakan tentang pelebaran jalan di kawasan hutan lindung. 01. Blm adanya TTD MOU antara perhutani dan pemkab. Berarti pekerjaan tersebut atas dasar perintah personal bukan kabupaten. 02. Adanya pelanggaran perhutani membiarkan, mengabaikan dan tidak mengawasi adanya kegiatan pengerukan dan pelebaran jalan ukir bayi. 03. Pelanggaran alat berat masuk dalam kawasan hutan yang dapat merusak Eko sistem alam seperti tanah, dan tumbuh2han. 04. Pelanggaran pengerukan tanah untuk pelebaran jalan disepanjang kawasan ukir bayi. 05. Berdampak nya tanah pinggiran jalan hilang kepadatannya karna banyak tumbuh2han yang rusak dimana akarnya sebagai penahan tanah tidak ada lagi, yg mengakibatkan longsor baik Musim kemarau atau musim hujan. 06. Berdampak pohon yang dekat jalan yg dikeruk bnyak yang ambruk/tumbang. 07. Jika alasan pelebaran jalan untuk sektor wisata, itu tidak benar. karna kawasan ukir bayi merupakan kawasan hutan yg dilindungi. 08. Jika alasan pelebaran jalan untuk sektor sekat bakar, maka harus ada panduan dan mengikuti SOP yang benar sesuai peraturan dan perundang

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
21	240201	PT Manna Jaya Makmur	Mojokerto	Jawa Timur	Dugaan PT Manna Jaya Makmur menyerahkan limbah tanah terkontaminasi B3 kepada pihak ketiga tidak berizin
22	240211	Objek Wisata Linggo Asri	Pekalongan	Jawa Tengah	Objek wisata linggoasri mengoleksi dan menggelar atraksi pertunjukan berbagai jenis satwa liar yang dilindungi undang-undangan, diantaranya: Merak hijau, burung kakak tua jambul kuning, owa kalimantan, lutung jawa, kijang/rusa, elang bondol dan gajah sumatera. Namun objek wisata Linggo Asri sampai sekarang belum mempunyai perizinan terkait atraksi dan pertunjukan satwa liar yang dilindungi undang-undang, apakah itu berbentuk lembaga konservasi ataupun pengankaran satwa liar. Sehingga asal-usul satwa liar kemungkinan diperoleh secara ilegal. Objek wisata linggoasri mengoleksi dan menggelar atraksi pertunjukan berbagai jenis satwa liar yang dilindungi undang-undangan, diantaranya: Merak hijau, burung kakak tua jambul kuning, owa kalimantan, lutung jawa, kijang/rusa, elang bondol dan gajah sumatera. Namun objek wisata Linggo Asri sampai sekarang belum mempunyai perizinan terkait atraksi dan pertunjukan satwa liar yang dilindungi undang-undang, apakah itu berbentuk lembaga konservasi ataupun pengankaran satwa liar. Sehingga asal-usul satwa liar kemungkinan diperoleh secara ilegal.
23	240215	PT Pendawa Mandiri Sejahtera	Kediri	Jawa Timur	1. Apakah memiliki izin pemanfaatan limbah B3?; 2. Apakah boleh mendirikan perusahaan di area peternakan?; 3. Apakah proses produksi telah dilakukan sesuai aturan?; 4. Apakah produk sesuai SNI?; 5. Apakah produk bisa diperjualbelikan?; 6. Apakah sudah ada TCLP nya dan limbahnya sesuai dan boleh diolah?; 7. Apakah ada laporan ke DLH terkait?; 8. Apakah sudah memiliki laboratorium dan staf khusus limbah B3?; 9. Apakah memiliki asuransi LH jika terjadi pencemaran?
24	240217	PT Xiang Wang Indonesia	Serang	Banten	Ditemukan sejumlah kambing warga mengalami kejang-kejang dan mati setelah minum air dari aliran irigasi kandang sapi yang bersumber dari aliran air pembuangan perusahaan kawasan pancatama ayang diduga tercemar.
25	240221	PT Solo Logo Indonesia	Serang	Banten	Ditemukan sejumlah kambing warga mengalami kejang-kejang lalu mati setelah minum air dari aliran irigasi kandang sapi yang bersumber dari aliran pembuangan perusahaan kawasan pancatama yang diduga telah tercemar.
26	240222	PT Farika Beton Cikande	Serang	Banten	Ditemukan sejumlah kambing warga mengalami kejang-kejang lalu mati setelah minum air dari aliran irigasi kandang sapi yang bersumber dari aliran pembuangan perusahaan kawasan pancatama yang diduga telah tercemar.
27	240223	PT Tri Hasta Perkasa	Serang	Banten	Ditemukan sejumlah kambing warga mengalami kejang-kejang lalu mati setelah minum air dari aliran irigasi kandang sapi yang bersumber dari aliran pembuangan perusahaan kawasan pancatama yang diduga telah tercemar.

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
28	240224	PT Multipack Intisempurna	Serang	Banten	Ditemukan sejumlah kambing warga mengalami kejang-kejang lalu mati setelah minum air dari aliran irigasi kandang sapi yang bersumber dari aliran pembuangan perusahaan kawasan pancatama yang diduga telah tercemar.
29	240225	PT Fonusa Agung Mulia	Serang	Banten	Ditemukan sejumlah kambing warga mengalami kejang-kejang lalu mati setelah minum air dari aliran irigasi kandang sapi yang bersumber dari aliran pembuangan perusahaan kawasan pancatama yang diduga telah tercemar.
30	240226	PT Delcoprima Pacific (Delcoprima Steel Mills)	Serang	Banten	Ditemukan sejumlah kambing warga mengalami kejang-kejang lalu mati setelah minum air dari aliran irigasi kandang sapi yang bersumber dari aliran pembuangan perusahaan kawasan pancatama yang diduga telah tercemar.
31	240227	PT Dasatria Utama	Serang	Banten	Ditemukan sejumlah kambing warga mengalami kejang-kejang lalu mati setelah minum air dari aliran irigasi kandang sapi yang bersumber dari aliran pembuangan perusahaan kawasan pancatama yang diduga telah tercemar.
32	240235	PT Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pasuruan	Jawa Timur	Diduga perusahaan melakukan pembuangan limbah B3 jenis fly ash dan bottom ash di lahan penduduk di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan
33	240268	PT Bintangmas Cahaya International	Serang	Banten	Ditemukan sejumlah kambing warga mengalami kejang-kejang lalu mati setelah minum air dari aliran irigasi kandang sapi yang bersumber dari aliran pembuangan perusahaan kawasan pancatama yang diduga telah tercemar.
34	240269	PT Agel Langgeng	Bekasi	Jawa Barat	Dugaan adanya kegiatan pengangkutan sampah berupa produk permen reject PT Agel Langgeng di Kota Bekasi menggunakan kendaraan pengangkut sampah DLH Kota Bekasi menuju TPA Bantar Gebang yang kemudian dilakukan penyortiran dan dijual kembali.
35	240270	PT Aksha Karunia Mill	Jombang	Jawa Timur	a. Dugaan PT Aksha Karunia Mill beroperasi tanpa memiliki persetujuan lingkungan; b. Asap cerobong pembakaran berwarna hitam pekat menyebabkan polusi udara; c. Adanya keluhan petani sekitar terkait adanya abu dan debu yang menyebar dan jatuh di tanaman petani; d. Dugaan PT Aksha Karunia Mill belum memiliki TPS Limbah B3 dan IPAL.
36	240271	PT Indonesia Epson Industry	Bekasi	Jawa Barat	a. Dalam melakukan aktifitas produksinya salah satu bahan bakunya menggunakan oli yang mengandung B3; b. Melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan (oli bekas) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Melakukan pengiriman limbah terkontaminasi B3 (re-eskpor) tanpa disertai syarat-syarat atau notifikasi dan tidak dikerjasamakan dengan pengelola yang memiliki izin untuk Ekspor limbah tersebut

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
37	240275	PT Sais Jaya Abadi	Gresik	Jawa Timur	Pada jam 18.00 hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, jaub di lokasi area pabrik sudah merasakan bau menyengat dan tak sedap yang diduga karena tidak adanya pengelolaan limbahnya serta adanya pencemaran udara (waktu bau tak sedap sudah berlangsung lama)
38	240318	RSUD Syarifah Ambami Ratoi Ebu	Bangkalan	Jawa Timur	Dugaan pembuangan limbah B3 di lokasi bekas tambang galian C DI Desa Sukolilo Barat, Kevamatan Labang, Kabupaten Bangkalan yang dilakukan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
39	240323	PT Kairos Logam Makmur	Surabaya	Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dugaan lokasi kegiatan usaha belum memiliki SLF 2. tidak memiliki cerobong asap yang sesuai ketentuan 3. tidak memiliki IPAL 4. pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai aturan K3 5 Abu limbah B3 dijual kepada pihak ketiga yang tidak berizin 6. tidak melaksanakan pelaporan pengelolaan limbah B3 7. Keabsahan izin lingkungan diragukan
40	240334	CV Putra Tunggal	Pati	Jawa Tengah	Dugaan CV Vulkanisir Putra Tunggal melakukan pembuangan limbah serbuk karet ban yang terkontaminasi Limbah B3 sisa produksi vulkanisir ban bekas di pinggir pabrik yang berbatasan dengan kawasan hutan, dan sebagian masuk ke kawasan hutan KHDPK_PS KTH Mulyo Makmur Abadi wilayah Perum Perhutani KPH Pati.
41	240344	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	Dugaan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing tidak dilakukan dengan sistem Sanitary Landfill akan tetapi pengelolaan dilakukan dengan sistem open dumping sejak awal beroperasi tahun 1992 hingga saat ini
42	240350	PT Wood One Integra	Sidoarjo	Jawa Timur	Dugaan PT Wood One Integra tidak memiliki Rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan menyerahkan Limbahnya kepada PT Jatsindo yang tidak berizin
43	240351	PT Jatsindo	Gresik	Jawa Timur	Dugaan PT Wood One Integra tidak memiliki Rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan menyerahkan Limbahnya kepada PT Jatsindo yang tidak berizin
44	240378	PT Sinar Continental	Kota Cimahi	Jawa Barat	Dugaan PT Sinar Continental menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga yang tidak berizin
45	240415	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tuban	Tuban	Jawa Timur	Adanya kebocoran Pipa Bahan Bakar Minyak PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tuban
46	240419	PT HAS Alam Sejahtera	Bojonegoro	Jawa Timur	Dugaan adanya aktifitas penggalian pasir pada areal kawasan persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) KTH Bendo Rejo dengan luas garapan kurang lebih 2 Ha. Ditemukan 2 alat berat berupa excavator saat groundcheck lapangan.
47	240421	PT BS JAYA	Sidoarjo	Jawa Timur	Dugaan dumping limbah B3 di Jalan aji barang Kabupaten Banyumas oleh PT BS JAYA
48	240440	PSKL, KSDA, CDK, Pemerintahan Desa Andonosari	Pasuruan	Jawa Timur	Pada bulan Februari telah terjadi kerusakan bentang alam di kawasan hutan menggunakan alat berat, pencabutan pohon yang ada dalam kawasan dan bulan April ada pembangunan di dalam kawasan Hutan Lindung

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
49	240443	PT Sarihusada Generasi Mahardhika	Klaten	Jawa Tengah	PT SGM melakukan penyimpanan limbah B3 berupa Drum yang diduga berisi Produk Kadaluarasa di luar Gudang penyimpanan Limbah B3 di area Parkiran Truk logistik yang berlangsung sekitar 3 bulan. Limbah tersebut diduga dikirim ke BUMDES yang tidak beizin
50	240460	PT Cahaya Mega Beton Indonesia	Demak	Jawa Tengah	Dugaan pembuangan limbah beton ke saluran irigasi dan kolam ikan tanpa diolah terlebih dahulu.
51	240471	PT Sabe Indonesia	Surabaya	Jawa Timur	Dugaan PT Sabe Indonesia tidak memiliki SLF, tidak memiliki TPS Limbah B3, tidak memiliki IPAL, Tidak menerapkan K3, mencampur limbah B3 dan Non B3 dinuang di lahan terbuka diluar gudang lokasi produksi, tidak melakukan pelaporan limbah B3, dan pengecekan keabsahan izin
52	240472	PT Sumber Graha Sejahtera	Jombang	Jawa Timur	Dugaan PT Sumber Graha Sejahtera melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pengangkut tidak berizin dan dibuang sembarangan di lokasi tanah warga di Jombang. kegiatan dilakukan sejak lama dan dibuang di beberapa tempat lainnya di Jombang
53	240473	PT Kutai Timber Indonesia	Probolinggo	Jawa Timur	Dugaan pencemaran dari asap serbuk dan retakkam rumah akibat aktivitas penurunan kayu log dari PT KTI
54	240510	PT Trax Sumbiri Indo	Batang	Jawa Timur	1. Pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia Departemen Advokasi tentang dugaan adanya kegiatan pengurukan dan pemadatan lahan tanpa izin di Pantai Sigandu Ujung Negro. 2. Pengadu melaporkan kegiatan tersebut karena diduga illegal tanpa melengkapi dokumen perijinan.
55	240524	PT Aneka Tuna Indonesia Unit Pandaan	Pasuruan	Jawa Timur	Pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran air di Sungai Wangi atau Sungai Kedondong di Kabupaten Pasuruan
56	240525	PT King Dragon Net	Pasuruan	Jawa Timur	Pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran air di Sungai Wangi atau Sungai Kedondong di Kabupaten Pasuruan
57	240526	PT Indesso Aroma	Banyumas	Jawa Tengah	Terdapat bau tidak sedap dan membuat sesak nafas, diduga membuang limbah pada sumur sehingga mencemari tanah, adanya limbah menumpuk tidak dikelola bertahun-tahun berada di area depan kantor dan kantor gudang PT Indesso Aroma, dan limbah diangkut dengan kendaraan yang tidak layak sehingga membahayakan di jalan
58	240534	PT Finexco Prima	Pasuruan	Jawa Timur	Pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran air di Sungai Wangi atau Sungai Kedondong di Kabupaten Pasuruan
59	240535	PT United Can	Pasuruan	Jawa Timur	Pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran air di Sungai Wangi atau Sungai Kedondong di Kabupaten Pasuruan
60	240562	PT Trans Anugrah Nusantara	Kota Tangerang	Banten	Dugaan pengumpulan limbah B3 tidak berizin yang dilakukan oleh PT Trans Anugrah Nusantara
61	240563	PT Semeru Makmur Kayunusa	Lumajang	Jawa Timur	Dugaan pencemaran udara akibat kegiatan PT Semeru Makmur Kayunusa, Kabupaten Lumajang

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
62	240589	PT Harvestindo Internasional	Tangerang	Banten	<p>1. Bahwa pengumpulan dan/atau pemanfaatan dan/atau pembuangan yang berlokasi di 2 lokasi yaitu di jln. veteran No. 9, RT. 001/005, Desa Suka Asih, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang-Banten dan di lokasi Kampung kendal, Desa sindang panon, Kecamatan Sindang Jaya diduga dari PT. Harvestindo Internasional tidak memiliki perizinan dan sangat merugikan masyarakat;</p> <p>2. Bahwa diduga kuat PT. Harvestindo Internasional melakukan penyalahgunaan prosedur sebagai perusahaan produksi Olahan;</p> <p>3. Bahwa Lokasi Tersebut dipoin 1 dan 2 diduga kuat tidak memiliki izin dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan, yang dimana diduga bekerja sama dengan pejabat desa setempat untuk melakukan dumping Limbah B3 maupun Limbah Non B3.</p>
63	240605	PT Surya Mahakam Agung Chemical	Mojokerto	Jawa Timur	dugaan kegiatan PT Surya Mahakam Agung Chemical menyebabkan pencemaran udara yang mengganggu kesehatan pernafasan di Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.
64	240626	PT Tiara Cipta Nirwana	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	Berdasarkan media online kompas.tv tanggal 4 Mei 2024 dan posbali.net tanggal 4 Juni 2024 adanya semburan material berupa lumpur di dalam laut yang diduga berasal dari limbah pabrik pengolahan air bersih PT TCN (Tiara Cipta Nirwana) di perairan Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara. Semburan material ini berupa asap atau lumpur keabuan dari sebuah lubang atau pipa hingga menutupi terumbu karang di wilayah tersebut, berpotensi mencemari dan/atau merusak ekosistem terumbu karang dan perairan TWP Gili Matra.
65	240630	PT Pakerin	Sidoarjo	Jawa Timur	Dugaan PT Pakerin membuang limbah sludge IPAL tanpa izin di Desa Simpang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
66	240631	PT Mega Surya Eratama	Mojokerto	Jawa Timur	Dugaan PT Mega Surya Eratama mengangkut dan membuang limbah plastik di lahan kosong di Desa Tanjanganono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
67	240632	PT Industri Cahaya Cipta Indonesia	Surabaya	Jawa Timur	Dugaan kegiatan pengecoran logam tanpa izin oleh PT Industri Cahaya Cipta Indonesia di Kota Surabaya
68	240633	PT Satelit Sriti	Pasuruan	Jawa Timur	dugaan dumping limbah oleh PT Satelit Sriti di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur pada Koordinat 7o 37' 8" LS dan 112o 44' 18" BT
69	240636	PT Bioli Lestari	Surabaya	Jawa Timur	Pada tanggal 13 Agustus 2024 ditemukan dugaan keberadaan pengecoran besi dan/atau baja tanpa izin (illegal).
70	240662	PT Salco	Jombang	Jawa Timur	Dugaan keberadaan pengecoran besi dan/atau baja tanpa izin (ilegal)
71	240663	PT Salco	Jombang	Jawa Timur	pabrik sepatu mengganggu lalu lintas jalan, menyebabkan polusi udara dan limbah yang dibuang ke saluran berbau

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
72	240664	PT Kusuma Mukti Remaja	Karanganyar	Jawa Tengah	1. Limbah B3 yang dihasilkan belum dikelola dengan baik, mengingat perusahaan menyuplai program nasional minyak kita yang pastinya limbah b3 yang dihasilkan sangat banyak dan meresahkan warga Jaten; 2. Penambahan kegiatan ilegal atau tanpa perizinan karena sampai sampai sekarang tidak ada sosialisasi terhadap kegiatan tersebut
73	240673	PT Tri Abadi Purnama	Kendal	Jawa Tengah	dugaan kegiatan PT Tri Abadi Purnama menimbulkan pencemaran udara berupa debu di Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
74	240674	PT Prima Beton Bangun Persada	Gresik	Jawa Timur	Berdasarkan temuan kami pada 25 juli, kami menduga perusahaan telah melakukan dumping/pembuangan limbah slag baja di area terbuka, di sebelah utara atau belakang perusahaan yang berada di leban waras kecamatan wringinanom, kabupaten gresik
75	240675	PT Widatra Bakti	Pasuruan	Jawa Timur	Limbah cair industri dan domestik setelah diolah di IPAL, untuk pembuangan akhir seharusnya dibuang ke badan sungai atau dimanfaatkan di area perusahaan. Namun, air limbah dibuang ke jaringan irigasi banyak sludge, sangat berbau dan mengeluarkan asap.
76	240678	PT Sumber Graha Sejahtera	Jombang	Jawa Timur	Pencemaran udara berupa asap tebal dari cerobong
77	240698	CV Bumi Indah	Blitar	Jawa Timur	Lahan yang ditempati oleh CV Bumi Indah tanah bekas Redist yang dahulunya perkebunan Kopi, sudah ditanami tanaman keras dan tanaman perkebunan. Namun setelah Redist, kemudian belum sampai 10 tahun, sudah berganti pemiik dan dijadikan Kandang Ayam kapasitas 1juta ekor, sehingga tidak ada lagi tanaman keras yang tumbuh di area tersebut
78	240699	PT Nusantara Segar Abadi	Blitar	Jawa Timur	Lahan yang ditempati oleh PT NSA adalah lahan HGU yang harusnya ditanami tanaman keras dan tanaman perkebunan. Namun faktanya perusahaan menanam tanaman lain yaitu pisang, nanas, pepaya. Sedangkan tanaman tersebut tidak bisa menyimpan hujan dan cenderung menterap air
79	240717	PT Bali Restu Laundry	Badung	Bali	Dugaan PT BaI Restu Laundry melakukan usaha dan/atau kegiatan laundry dengan menggunakan boiler sebagai pemanas yang berbahan bakar limbah B3 oli bekas
80	240721	PT Wings Surya Driyorejo Factory (WIngs Group)	Gresik	Jawa Timur	a. Terdapat limbah pabrik yang mengeluarkan bau tidak sedap sehingga membuat sesak nafas. b. Adanya limbah yang menumpuk dan tidak dikelola oleh pihak perusahaan yang berlangsung bertahun tahun. Limbah B3 tersebut diduga disimpan di area depan pabrik.
81	240723	PT Bintang Ciptaperkasa	Bandung	Jawa Barat	Perusahaan diduga melakukan pembuangan air limbah yang mengakibatkan pencemaran air
82	240724	PT Hokkan Indonesia	Bogor	Jawa Barat	Gangguan pencemaran udara berupa banyaknya residu debu dan polutan, serta gangguan tanah dan kebisingan akibat kegiatan pemancangan proyek pabrik PT Hokkan Indonesia

No	Nomor Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Uraian Pengaduan
83	240726	PT Buana Megah Paper Mills	Pasuruan	Jawa Timur	Dugaan PT Buana Megah Paper Mills tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dan Non B3, perusahaan melakukan dumping atau pembuangan limbah ilegal di dalam area perusahaan
84	240730	PT Leadway Silkscreen Printing	Demak	Jawa Tengah	Perusahaan tidak memiliki perijinan yang dipersyaratkan diantaranya: persetujuan lingkungan (ukl-upl), rintek, pertek pengelolaan limbah B3 dan atau izin IPAL. Perusahaan beroperasi sekitar 4 tahun sejak pertama kali dibangun namun sampai sekarang belum selesai dokumen lingkungannya.
85	240731	PT Pei Hai Internasional Wiratama Unit 1	Jombang	Jawa Timur	Mengganggu lalu lintas jalan dan limbah yang dibuang ke saluran berbau
86	240732	PT Pei Hai Internasional Wiratama Unit 2	Jombang	Jawa Timur	Mengganggu lalu lintas jalan dan limbah yang dibuang ke saluran berbau
87	240734	PT Maxima Daya Indonesia	Mojokerto	Jawa Timur	Dugaan PT Maxima Daya Indonesia melakukan penjualan limbah kabel kepada warga sekitar tanpa izin
88	240740	Karaoke Pegassus	Sleman	Yogyakarta	Dugaan kegiatan usaha Karaoke PEGASSUS menimbulkan gangguan berupa kebisingan dan getaran
89	240771	PT Java Pacific	Sidoarjo	Jawa Timur	Dugaan PT Java Pacific melakukan pembuangan air limbah di luar titik pelepasan dan pembuangan air limbah cooling tower tanpa dilakukan pengolahan ke saluran drainase
90	240782	PT Adiprima Suraprinta	Gresik	Jawa Timur	Dugaan penimbunan sludge IPAL yang sudah diratakan dan dipaving di area Perusahaan, pencemaran udara dari pembakaran batubara, dan penambahan area untuk lokasi penimbunan IPAL
91	240803	PT Jaya Huma Perkasa	Demak	Jawa Tengah	Dugaan pembuangan limbah beton ke saluran irigasi dan kolam ikan tanpa diolah terlebih dahulu
92	240805	Bali Social Klub	Badung	Bali	Kejadian bermula Masyarakat sekitar social club bali menemukan adanya tindakan yang dapat merugikan masyarakat sekitar lokasi social club di bali terutama dalam pengelolaan izin pendirian lingkungan yang ada di lokasi tersebut. Sampai dengan saat ini social club tidak dapat memberikan keterangan terkait dengan Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) Karena setiap badan usaha wajib memiliki SPPL tersebut karena sangat penting untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Izin ini sangat perlu di lakukan terutama social club bali sampai dengan dengan saat ini tidak memiliki izin SPPL. Social club bali harus memiliki izin tersebut karena usaha dalam skala besar dan perlu di lakukan pengecekan terhadap usaha tersebut
93	240823	PT Sangkaya Makmur Abadi I	Gresik	Jawa Timur	Pada saat pendirian SMA I tidak ada sosialisasi kepada warga. AMDAL nya di sosialisasi do RT 09 tetapi lokasinya di RT 12. Aktivitas pembangunan atau proyek telah berdampak kepada lingkungan. Debu, kebisingan, getaran dan kegaduhan yang ditimbulkan menjadikan keresahan bagi masyarakat. Kesabaran warga telah mencapai batasnya setelah adanya permintaan penyelesaian terkait hal-hal di atas diabaikan perusahaan,
94	240824	PT Sangkaya Makmur Abadi II	Gresik	Jawa Timur	Lokasi yang diajukan tidak sesuai, beroperasi sebelum izin lingkungan terbit
95	240917	PT Xingyun Jaya Abadi	Malang	Jawa Timur	Adanya gangguan lingkungan berupa kebisingan dan getaran
96	240918	PT Ussy Persada Group	Probolinggo	Jawa Timur	Dugaan kerusakan hutan perhutani di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto KPH Probolinggo yang menjadi alih fungsi pertambangan tanah TRAS yang diduga dilakukan oleh PT Ussy Persada Group seluas kurang lebih 30 hektar yang diduga ilegal
97	240921	PT Lippo Cikarang	Bekasi	Jawa Barat	Dugaan terdapat pengelolaan sampah ilegal yang menimbulkan bau tidak sedap dan asap akibat sampah yang terbakar
98	241000	TPSA Burangkeng DLH Kab Bekasi	Bekasi	Jawa Barat	Diduga terjadi longsoran sampah yang menyebabkan robohnya dinding pembatas antara TPSA Burangkeng dengan perumahan warga Desa Burangkeng. Diduga terjadi pembuangan air lindi dari timbunan sampah di TPSA Burangkeng yang tidak dikelola menggunakan instalasi pengolahan air lindi dan dibuang langsung ke saluran drainase menuju Kali Kembang
99	241001	PT Energi Lautan Nusantara	Malang	Jawa Timur	Pabrik sudah 2 tahun berdiri tetapi belum ada sosialisasi, mulai beroperasi dari jam 5 pagi - 8 malam bisin mesin sangat keras
100	241046	UD Kembar Group	Gresik	Jawa Timur	Dugaan kegiatan usaha UD Kembar Group menimbulkan pencemaran udara di Perumahan Greenhill, Kabupaten Gresik

F. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan terealisasi sebanyak 21 operasi dari target sebanyak 15 operasi atau 140%, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 9. Daftar Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Tahun 2024

NO	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JUMALAH PERSONIL (ORANG)
1	RPH Pakis, BKPH Cikalong, KPH Purwakarta, Kab. Karawang, Jawa Barat	15-18 Pebruari 2024	16
2	Kab. Probolinggo, Jawa Timur	24-26Pebruari 2024	6
3	KPH Bandung Utara, Jawa Barat	25-29 Maret 2024	12
4	KPH Ciamis, Pangandaran, Jawa Barat	1-4 April 2024	28
5	Kab. Jember, Jawa Timur	4-8 April 2024	6
6	BKPH Cwedei dan BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan, Jawa Barat	28 Mei 2024 -2 Juni 2024	12
7	Wilayah Gunung Putri, BBTN GG Pangrango, Jawa Barat	19-23 Juni 2023	15
8	Kab. Situbndo, Jawa Timur	7-9 Agustus 2024	7
9	TN G Bromo, Jawa Timur	15-19 Agustus 2024	19
10	TN G Bromo , Jawa Timur	17-21 September 2024	7
11	PTN III dan IV Sukabumi, Jawa Barat	30 September 2024 - 6 Oktober 2024	15
12	TN Rinjani, Nusa Tenggara Barat	1-7 Oktober 2024	20
13	TN Baluran, Situbondo, Jawa Timur	30September 2024 - 4 Oktober 2024	9
14	Tahura R. Soeryo, Pasuruan, Jawa Timur	30 September 2024 - 4 Oktober 2024	8
15	Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur	7-13 Oktober 2024	20
16	RTK 85 TTS, Nusa Tenggara Timur	7-11 Oktober 2024	30
17	TN Ujung Kulon, Banten	9-13 Oktober 2024	4
18	TN. Meru Betiri, Jember, Jawa Timur	19-21 Oktober 2024	5
19	TN. Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah	25-28 Oktober 2024	18
20	TN Karimun Jawa, Jawa Tengah	18-23 Nopember 2024	11
21	KHDTK UB Malang, Jawa Timur	19-23 Nopember 2024	10

G. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal terealisasi sebanyak 18 Operasi dari target sebanyak 15 Operasi atau 120%.

Tabel 10. Daftar Operasi Peredaran Hasil Hutan Tahun 2024

NO	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JUMALAH PERSONIL (ORANG)
1	Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur	26 Pebruari 2024 - 1 Maret 2024	4
2	Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur	2-5 Maret 2024	15
3	Probolinggo, Jawa Timur	6-8 Maret 2024	4
4	Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur	9-13 Maret 2024	10
5	Temanggung, Jawa Tengah	14-17 Mei 2024	11
6	Sukabumi, Jawa Barat	16-18 Mei 2024	10
7	TN Komodo dan Teluk Sape, Nusa Tenggara Timur	4-10 Juni 2024	16
8	Gresik dan Surabaya, Jawa Timur	28-31 Mei 2024	13
9	Semarang, Jawa Tengah	30 Mei 2024 - 2 Juni 2024	9
10	Bekasi, Jawa Barat	1-5 Juli 2024	10
11	Klaten, Jawa Tengah	5-7 Agustus 2024	19
12	Surakarta, Jawa Tengah	27-30 Agustus 2024	6
13	Depok, Jawa Barat	12-15 Nopember 2024	17
14	Surabaya, Jawa Timur	13-14 Nopember 2024	10
15	Klaten, Jawa Tengah	10-12 Desember 2024	11
16	Situbondo, Jawa Timur	14-17 Desember 2024	10
17	Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	13-19 Desember 2024	19
18	TN. Ujung Kulon, Banten	07Desember2024	14

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya.

Secara rinci perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (T-1/Tahun 2023) di samping terdapat beberapa kenaikan capaian kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, juga terdapat penurunan kinerja sebagaimana tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN IKK	
			2023	2024
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gang-guan dan anc-aman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	15 Operasi	21 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal.	15 Operasi	18 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	22 Orang	60 Orang
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkung-an dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	212 izin	161 izin

4.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	33 Kasus	41 Kasus
5.	Penyelesaian Lingkungan Hidup	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	2 Kasus	6 Kasus

3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari tabel 12 tersebut di atas dapat dilihat adanya besaran peningkatan kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2024 dibandingkan kinerja tahun 2023, dan juga penurunan kinerja pada beberapa IKK dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada tahun 2024 sebesar Rp. 67.901.704.000,- lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya (2023) sebesar Rp. 56.821.723.000,-. Namun, pagu anggaran tahun 2024 tersebut bukan tercatat dari awal tahun anggaran, terjadi pengurangan anggaran di tengah tahun. Anggaran awal tahun 2024 adalah sebesar Rp. 70.041.050.000,-.
2. Adanya kegiatan Pembangunan Pusat Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu untuk proses pengadaan barang/jasa, juga turut mempengaruhi kinerja Balai secara keseluruhan.

3.1.4 Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pengukuran tingkat efektivitas pencapaian kinerja tahun 2024 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2024. Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu :

- 1) Rasio perbandingan > 1 , artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya;
- 2) Rasio perbandingan $= 1$, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2024, tetap/sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun 2023.
- 3) Rasio perbandingan < 1 , menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun, artinya efektivitas kinerja 2024 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja 2023.

Pengukuran efisiensi pencapaian kinerja tahun 2024 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran tahun 2023. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi pencapaian kinerja yang dilaksanakan tahun 2024. Kriteria yang dijadikan pedoman efisiensi pencapaian kinerja, yaitu:

- 1) Rasio perbandingan > 1 atau $= 1$, artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2024 berjalan secara efisien.
- 2) Rasio perbandingan < 1 , menunjukkan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2024.

Tabel Capaian efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Tahun 2024 digambarkan dalam tabel 13 dibawah ini :

Tabel 13. Capaian Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Indikator Kegiatan	Capaian				Efektif	Efisiens	Capaian Kegiatan
		Capaian OP		DIPA 2024				
		2023	2024	Realisasi	Capaian			
1	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	250,00%	140,00%	3.229.489.834	100,00%	0,56	1,40	21 Operasi
2	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	250,00%	120,00%	3.688.061.229	100,00%	0,48	1,20	18 Operasi
3	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	146,67%	400,00%	183.493.892	100,00%	2,73	4,00	60 Orang
4	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	133,33%	129,84%	2.931.358.030	100,00%	0,97	1,30	161 Per-usahaan
5	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	100,00%	300,00%	790.260.001	99,99%	3,00	3,00	6 Kasus
6	Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	103,13%	102,50%	8.991.364.160	99,96%	0,99	1,03	41 Kasus
7	Layanan Perkantoran	100%	100%	34.146.303.726	99,68%	1,00	1,00	1 Layanan
8	Layanan Umum	100%	100%	1.599.938.182	100,00%	1,00	1,00	1 Layanan
9	Layanan Sarana Internal	100%	100%	12.222.443.341	100,00%	1,00	1,00	1 Layanan

Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara dibandingkan Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 untuk masing-masing IKK dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,56 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, hal ini disebabkan perencanaan lokasi dan sasaran tidak dilakukan dengan baik. Sehingga masing-masing kegiatan berdiri sendiri-sendiri, tidak bersinergi dengan baik.
- Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,48 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, hal ini juga disebabkan oleh perencanaan lokasi dan sasaran tidak dilakukan dengan baik. Sehingga masing-masing kegiatan berdiri sendiri-sendiri, tidak bersinergi dengan baik. Apalagi khususnya operasi peredaran TSL memang cukup dominan di wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, karena menjadi lokasi tujuan perdagangan dari berbagai daerah di Indonesia.
- Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 2,73 atau > 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, hal ini disebabkan kegiatan latihan menembak, dilaksanakan di masing-masing seksi wilayah, sehingga lebih efektif;
- Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,97 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, hal ini disebabkan sasaran pengawasan yang diberikan oleh Direktorat PPSA sangat terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan juga terbatas, lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2023;

- Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P.21 (berkas perkara dinyatakan lengkap). Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,99 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, hal ini disebabkan target kasus dinyatakan lengkap (P.21) pada tahun 2024 sebanyak 40 Kasus, lebih banyak dibanding tahun 2023 sebanyak 32 kasus. Demikian pula realisasi kasus P.21 tahun 2024 sebanyak 41 kasus, lebih banyak dari tahun 2023 sebanyak 33 kasus.
- Layanan Perkantoran. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,00 atau $= 1$; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 tetap/sama dengan tahun 2023, hal ini dikarenakan layanan dukungan Layanan Perkantoran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.
- Layanan Umum. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 sama dengan capaian efektivitas kinerja tahun sebelumnya, juga dikarenakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.
- Layanan Sarana Internal. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 sama dengan capaian efektivitas kinerja tahun sebelumnya, juga dikarenakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.
- Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 3,00 atau > 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, hal ini disebabkan karena sudah berpengalaman pada tahun sebelumnya, yang merupakan tahun pertama, sehingga pelaksanaan tahun ini menjadi lebih efektif;.

Sedangkan nilai untuk capaian efisiensi penggunaan anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024, untuk masing-masing IKK sebagai berikut :

- Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2024 sebesar 1,40 atau > 1 ; yang berarti penggunaan anggaran tahun 2023 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar 1,20 atau > 1 , berarti penggunaan anggaran berjalan secara efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar 4,00 atau > 1 , berarti penggunaan anggaran berjalan secara efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2024 sebesar 1,30 atau > 1 , yang berarti penggunaan anggaran tahun 2024 berjalan secara efisien dalam mencapai sasaran kegiatan. Hal ini ditambah lagi adanya anggaran yang digunakan untuk kegiatan penanganan pengaduan non perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Pada tahun 2024 terdapat penanganan pengaduan non perusahaan sebanyak 23 sasaran dari rencana sebanyak 15 sasaran (153,33%);
- Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2024 sebesar 3 atau > 1 , berarti penggunaan anggaran berjalan secara efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar 1,03 atau > 1 , berarti penggunaan anggaran efisien dalam mencapai sasaran kegiatan

- Layanan Perkantoran. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2024 sebesar 1.00 atau = 1, yang berarti penggunaan anggaran tahun 2024 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Layanan Umum. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2024 sebesar 1,00 atau = 1 ; yang berarti capaian efisiensi penggunaan anggaran 2024 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Layanan Sarana Internal. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2024 sebesar 1,00 atau = 1 ; yang berarti capaian efisiensi penggunaan anggaran 2024 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pelaksanaan kinerja yaitu dengan adanya Sumber Daya Manusia yang mencukupi untuk Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Adapun kendala pencapaian pelaksanaan kinerja yaitu adanya pemahaman yang belum komprehensif oleh personel terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

3.2 Realisasi Anggaran

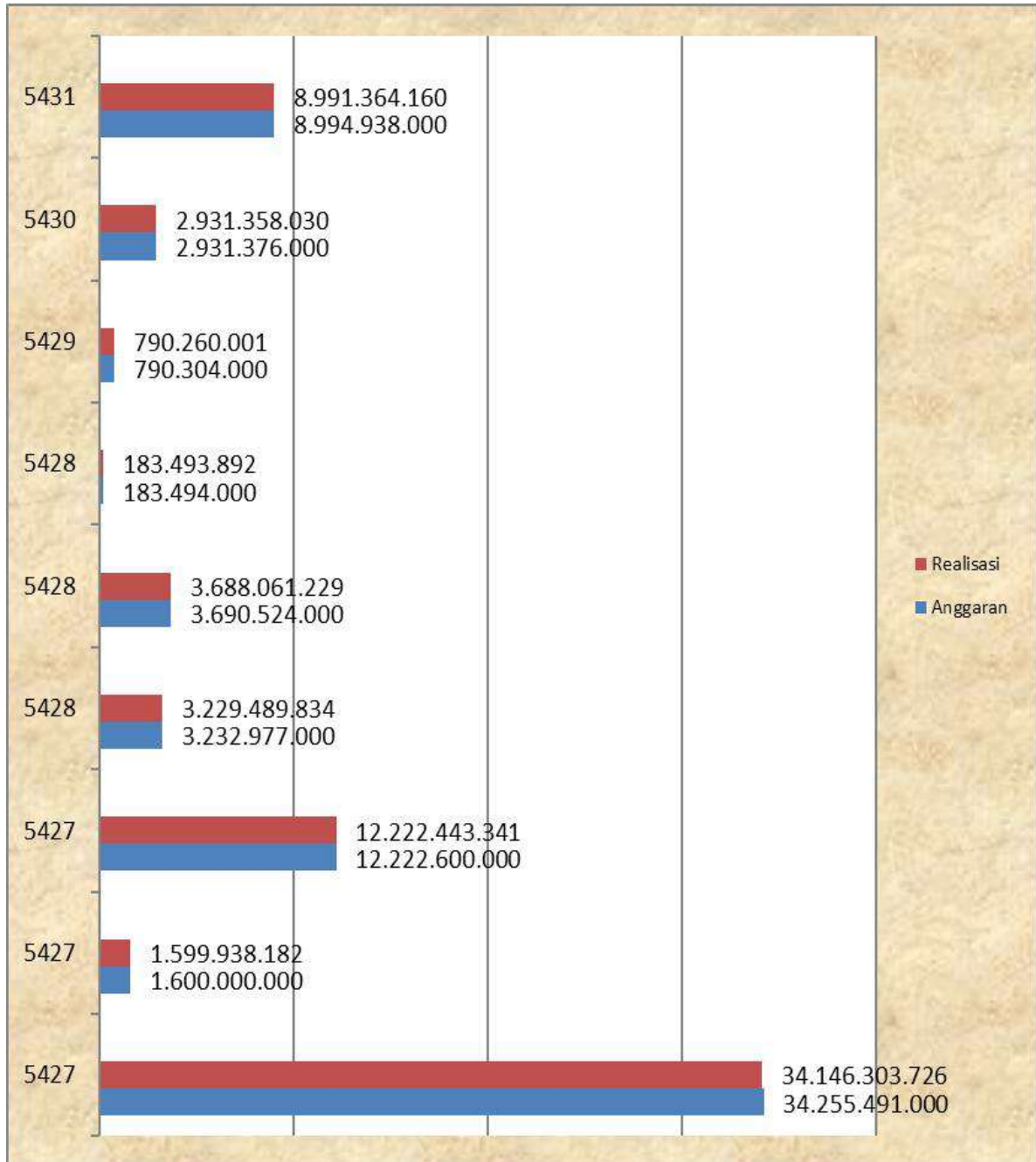
Tahun 2024, anggaran awal BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebesar Rp. 70.041.050.000,-, namun setelah mengalami beberapa kali penyesuaian, akhirnya anggaran Balai sebesar Rp. 67.901.704.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Aplikasi Sakti, tercapai sebesar Rp. 67.782.712.395,- dengan prosentase sebesar 99,82 % dari pagu anggaran.

Secara rinci pagu anggaran dan realisasi anggaran DIPA Satker BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2024

MAK		IKK	TAHUN 2024		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5427	EBA	Layanan Perkantoran	34.255.491.000	34.146.303.726	99,68
5427	EBA	Layanan Umum	1.600.000.000	1.599.938.182	100,00
5427	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12.222.600.000	12.222.443.341	100,00
5428	QHB	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	3.232.977.000	3.229.489.834	99,89
5428	QHB	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	3.690.524.000	3.688.061.229	99,93
5428	DCE	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	183.494.000	183.493.892	100,00
5429	QCE	Penyelesaian Sengketa LH	790.304.000	790.260.001	99,99
5430	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga/Badan Usaha	2.931.376.000	2.931.358.030	100,00
5431	QCE	Kasus Tindak Pidana P.21	8.994.938.000	8.991.364.160	99,96
JUMLAH			67.901.704.000	67.782.712.395	99,82

Grafik 3. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024



Adapun realisasi anggaran sejak tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2020-2024

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2020	44.426.970.000	44.306.178.080	99,73
2021	35.617.670.000	35.541.538.685	99,79
2022	41.185.745.000	41.157.228.892	99,93
2023	56.821.723.000	56.790.615.876	99,95
2024	67.901.704.000	67.782.712.395	99,82

Grafik 3. Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2020-2024



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2024, adalah :
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan Perkantoran)
 - b. Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT (Layanan Umum)
 - c. Layanan Sarana Internal
 - d. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan;
 - e. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal;
 - f. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan;
 - g. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
 - h. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - i. Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21;
- 2) Capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,56 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, hal ini disebabkan perencanaan lokasi dan sasaran tidak dilakukan dengan baik. Sehingga masing-masing kegiatan berdiri sendiri-sendiri, tidak bersinergi dengan baik.
 - b. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,48 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, hal ini juga disebabkan oleh perencanaan lokasi dan sasaran tidak dilakukan dengan baik. Sehingga masing-masing kegiatan berdiri sendiri-sendiri, tidak bersinergi dengan baik. Apalagi khususnya operasi peredaran TSL memang cukup dominan di wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, karena menjadi lokasi tujuan perdagangan dari berbagai daerah di Indonesia.

- c. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 2,73 atau > 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, hal ini disebabkan kegiatan latihan menembak, dilaksanakan di masing-masing seksi wilayah, sehingga lebih efektif;
- d. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,97 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, hal ini disebabkan sasaran pengawasan yang diberikan oleh Direktorat PPSA sangat terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan juga terbatas, lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2023;
- e. Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P.21 (berkas perkara dinyatakan lengkap). Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,99 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023, hal ini disebabkan target kasus dinyatakan lengkap (P.21) pada tahun 2024 sebanyak 40 Kasus, lebih banyak dibanding tahun 2023 sebanyak 32 kasus. Demikian pula realisasi kasus P.21 tahun 2024 sebanyak 41 kasus, lebih banyak dari tahun 2023 sebanyak 33 kasus.
- f. Layanan Perkantoran. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,00 atau $= 1$; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 tetap/sama dengan tahun 2023, hal ini dikarenakan layanan dukungan Layanan Perkantoran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.
- g. Layanan Umum. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 sama dengan capaian efektivitas kinerja tahun sebelumnya, juga dikarenakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.
- h. Layanan Sarana Internal. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024

sama dengan capaian efektivitas kinerja tahun sebelumnya, juga dikarenakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.

- i. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 3,00 atau > 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, hal ini disebabkan karena sudah berpengalaman pada tahun sebelumnya, yang merupakan tahun pertama, sehingga pelaksanaan tahun ini menjadi lebih efektif;.
- 3) Anggaran DIPA Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2024 sebesar sebesar Rp. 70.041.050.000,-, namun setelah mengalami beberapa kali penyesuaian, akhirnya anggaran Balai sebesar Rp. 67.901.704.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Aplikasi Sakti, tercapai sebesar Rp. 67.782.712.395,- dengan prosentase sebesar 99,82 % dari pagu anggaran.

4.2. Saran

- 1) Kegiatan yang telah mencapai target, agar dipertahankan dan ditingkankan lagi.
- 2) Meningkatkan capaian kinerja dengan lebih mengedepankan lagi efisiensi dan efektivitas.
- 3) Kegiatan PPH (Puldasi dan Operasi) dan PHP (Puldasi dan Penyidikan), lebih efektif apabila didasarkan pada pengaduan yang masuk ke BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, sehingga penanganan penegakan hukum lebih bermanfaat untuk masyarakat.
- 4) Pelaksanaan operasi hendaknya dipersiapkan dengan matang, sehingga menghasilkan output yang maksimal dan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penegakan hukum pidana (PHP)

**DOKUMENTASI KEGIATAN
BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA
BALI NUSA TENGGARA
TAHUN 2024**

Foto. 1. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Tahun 2024



Foto. 2. Operasi Peredaran Hasil Hutan



Foto. 3. Puldasi Pengamanan Kawasan Hutan



Foto. 4. Puldasi Peredaran Hasil Hutan



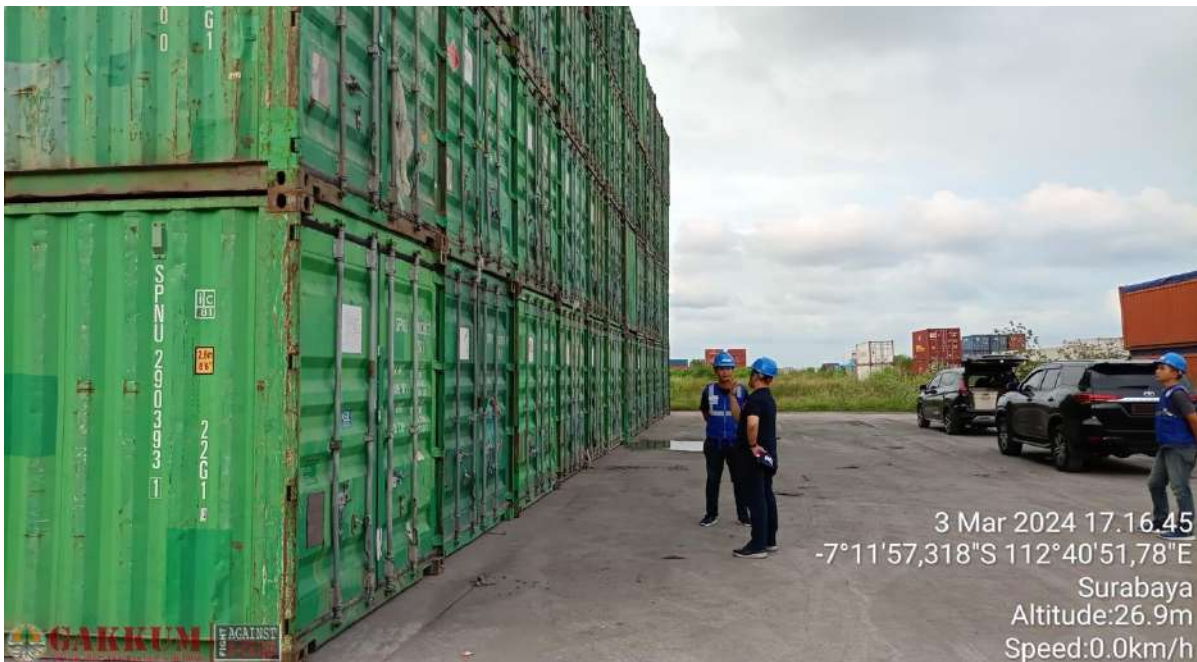
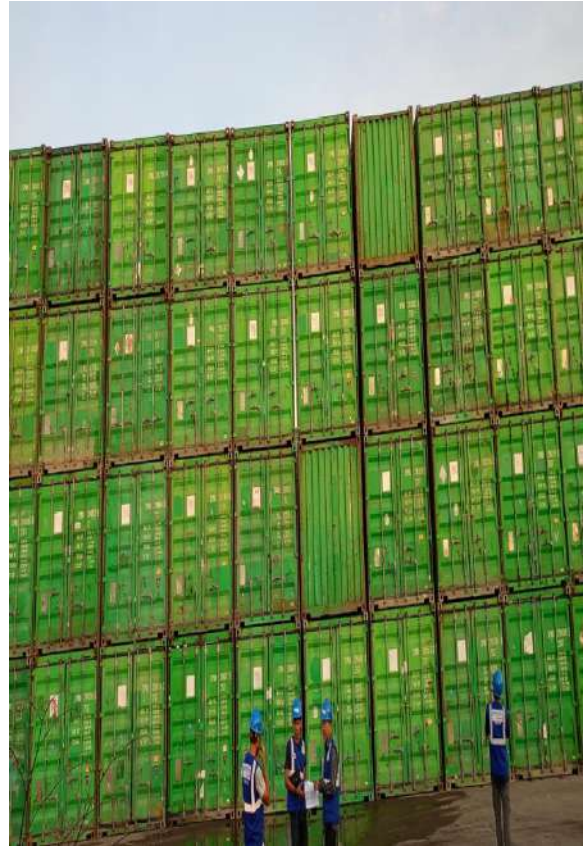


Foto 5. Kegiatan Verifikasi Lapangan Pengaduan



Foto 6. Kegiatan Pengawasan



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 08/01/25 9:08 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

UAPB : 029
UAKPB : 401815

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		325	10,532,438,000	0	0	0	0	325	10,532,438,000
20101	TANAH PERSIL	-	325	10,532,438,000	0	0	0	0	325	10,532,438,000
132111	Peralatan dan Mesin		2,261	36,040,097,740	205	2,995,503,897	6	642,000,000	2,460	38,393,601,637
30103	ALAT BANTU	-	1	56,100,000	8	32,800,000	0	0	9	88,900,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	78	16,437,691,345	5	1,556,553,357	2	563,300,000	81	17,430,944,702
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	-	1	8,910,957,199	0	0	0	0	1	8,910,957,199
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	1	5,200,000	0	0	0	0	1	5,200,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	95	4,611,000	0	0	0	0	95	4,611,000
30303	ALAT UKUR	-	90	130,375,000	0	0	0	0	90	130,375,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	37	162,778,822	0	0	0	0	37	162,778,822
30501	ALAT KANTOR	-	121	733,829,072	3	32,800,000	0	0	124	766,629,072
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	676	1,979,712,812	131	429,641,140	0	0	807	2,409,353,952
30601	ALAT STUDIO	-	122	838,085,098	1	36,800,000	0	0	123	874,885,098
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	74	421,389,425	6	125,589,000	3	56,300,000	77	490,678,425
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	9	54,176,000	0	0	0	0	9	54,176,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	255	427,616,335	7	13,300,000	0	0	262	440,916,335
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	2	7,400,800	0	0	0	0	2	7,400,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	99	803,570,890	0	0	0	0	99	803,570,890
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	6	26,235,000	3	144,450,000	0	0	9	170,685,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	12	13,860,000	0	0	0	0	12	13,860,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	0	0	1	2,420,000	0	0	1	2,420,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	1,100,000	0	0	0	0	1	1,100,000
30901	SENJATA API	-	31	921,905,500	0	0	0	0	31	921,905,500
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	-	14	89,645,000	0	0	0	0	14	89,645,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	152	688,607,810	0	0	0	0	152	688,607,810
31001	KOMPUTER UNIT	-	153	2,261,168,727	35	525,030,400	1	22,400,000	187	2,763,799,127
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	164	774,130,505	4	23,120,000	0	0	168	797,250,505
31503	ALAT SAR	-	50	186,597,400	0	0	0	0	50	186,597,400
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	0	0	1	73,000,000	0	0	1	73,000,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	12	23,400,000	0	0	0	0	12	23,400,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	5	79,954,000	0	0	0	0	5	79,954,000
133111	Gedung dan Bangunan		3	7,695,606,788	0	0	0	0	3	7,695,606,788
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	3	7,695,606,788	0	0	0	0	3	7,695,606,788
134112	Irigasi		1	110,102,000	0	0	0	0	1	110,102,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	110,102,000	0	0	0	0	1	110,102,000
134113	Jaringan		5	44,848,000	0	0	0	0	5	44,848,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 029
UAKPB : 401815

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 08/01/25 9:08 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	1	1,800,000	0	0	0	0	1	1,800,000
50309	INSTALASI PENGAMAN	-	2	300,000	0	0	0	0	2	300,000
50402	JARINGAN LISTRIK	-	1	32,748,000	0	0	0	0	1	32,748,000
50403	JARINGAN TELEPON	-	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
135111	Aset Tetap Renovasi		1	1,466,990,100	0	0	1	1,466,990,100	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	-	1	1,466,990,100	0	0	1	1,466,990,100	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		35	229,992,346	0	0	0	0	35	229,992,346
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	8	600,000	0	0	0	0	8	600,000
30501	ALAT KANTOR	-	2	27,284,000	0	0	0	0	2	27,284,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	4	17,800,000	0	0	0	0	4	17,800,000
30601	ALAT STUDIO	-	5	120,813,550	0	0	0	0	5	120,813,550
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	11	412,500	0	0	0	0	11	412,500
31001	KOMPUTER UNIT	-	4	58,791,308	0	0	0	0	4	58,791,308
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	1	4,290,988	0	0	0	0	1	4,290,988
TOTAL				56,120,074,974		2,995,503,897		2,108,990,100		57,006,588,771

Sidoarjo, 8 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Balai

Dr. Ardhi Yusuf S.Hut, M.Agr
196911151997031006



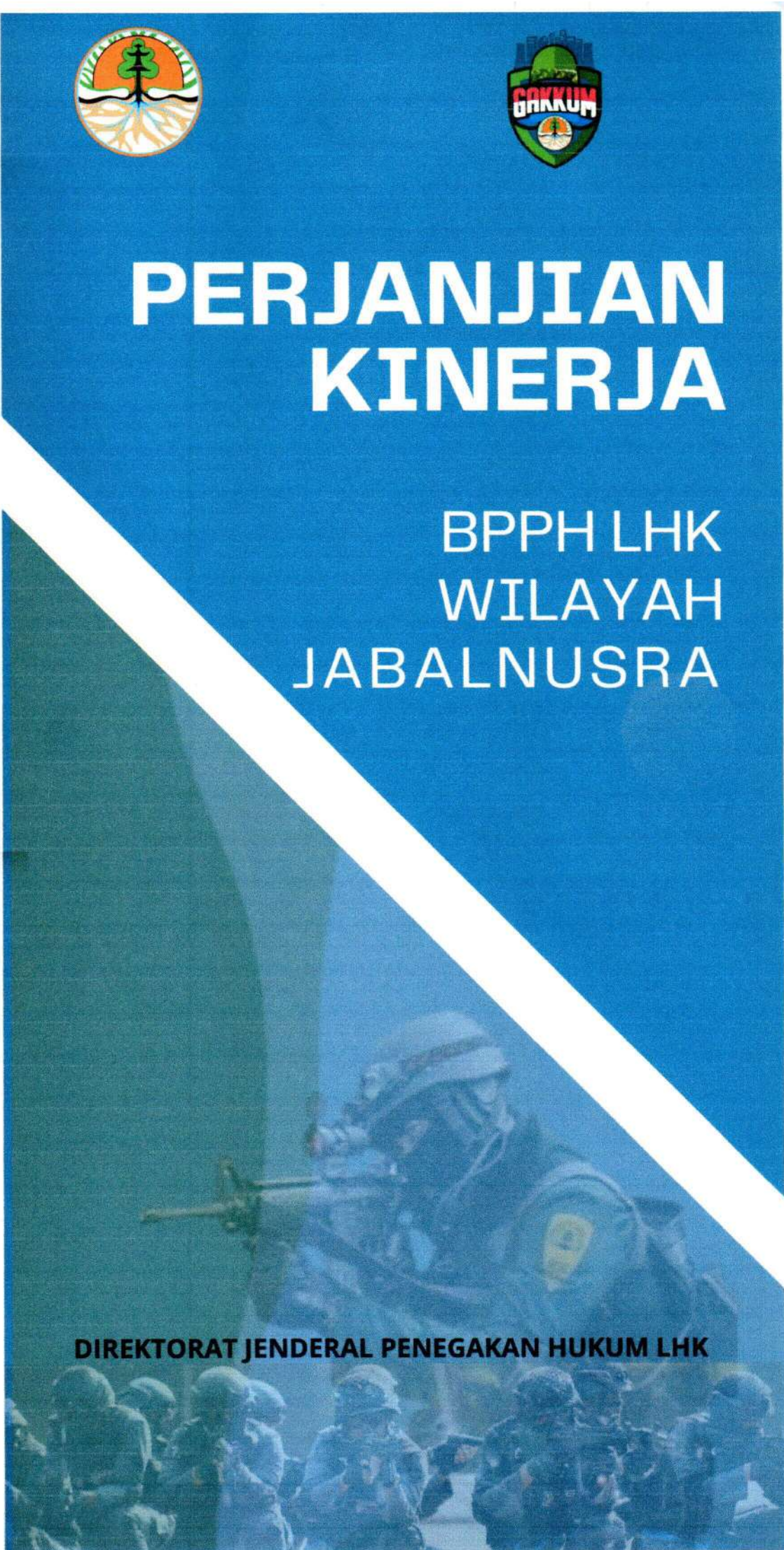
PERJANJIAN KINERJA

BPPH LHK
WILAYAH
JABALNUSRA

20
24

FIGHT
AGAINST
CRIMES

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK



KATA PENGANTAR

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara tahun 2024 ini merupakan dokumen yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang akan dilakukan oleh (BPPHLHK) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini memuat seluruh informasi terkait indikator, target serta besaran alokasi anggaran BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara selama 1 (satu) tahun. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024. Dengan adanya dokumen ini diharapkan seluruh target dan sasaran, baik lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, dengan adanya Perjanjian Kinerja ini diharapkan adanya dukungan internal dan eksternal agar dapat mendorong peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab seluruh jajaran di lingkungan (BPPHLHK) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

Kepala Balai,



Taqiuddin, S.Hut., M.P

NIP.19740628 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024	1
B. TARGET KINERJA TAHUN 2024 PER UNIT KERJA	5
LAMPIRAN – LAMPIRAN	8

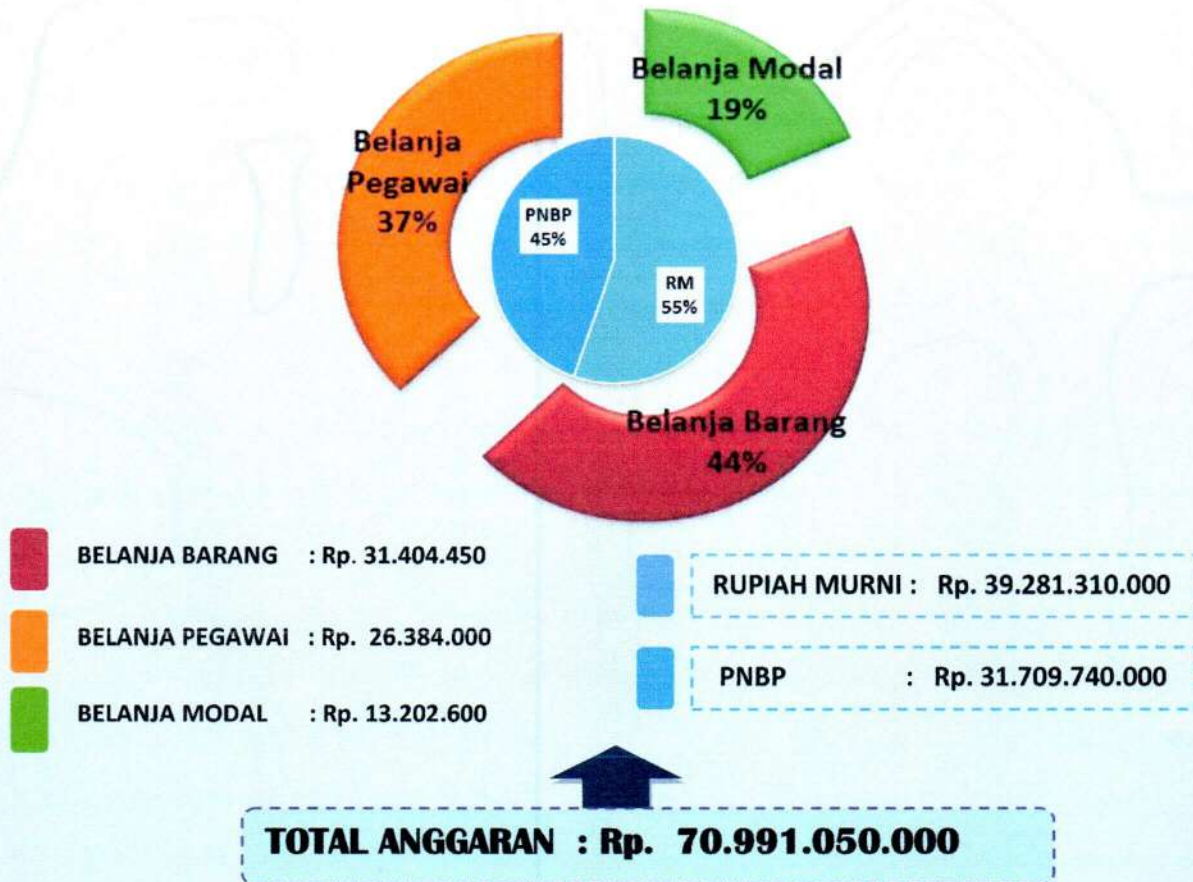
A.

Alokasi Anggaran Tahun 2024

Alokasi Anggaran pada awal Tahun 2024 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp. 70.991.050.000,- di bagi dalam tiap program adalah sebagai berikut :



Untuk alokasi anggaran per-jenis belanja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2024



RENCANA KERJA TAHUN 2024

Perencanaan Kinerja BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusra :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	SATUAN TARGET
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				
Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Penanganan perkara	2	Perkara
Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	124	Badan Usaha
Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Penanganan Perkara	40	Perkara
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	SATUAN TARGET
PROGRAM PENGELOLAN HUTAN BERKELANJUTAN				
Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK				
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan,	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan	15	Operasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	SATUAN TARGET
hidup dan peredaran hasil hutan	hidup dan peredaran	perusakan lingkungan		
	hasil hutan	hidup		
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	15	Operasi
		Jumlah POLHUT yang ditingkatkan kapasitasnya	15	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	SATUAN TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Ditjen Gakkum LHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	95,53 poin
		Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	

Detail Rencana Kerja:

NO	SASARAN KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN
PROGRAM: KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				
1	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	Rp. 580.000.000
Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				

NO	SASARAN KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan usaha yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.546.240.000
Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Rp. 9.920.900.000
TOTAL ANGGARAN				Rp. 14.047.140.000

PROGRAM: PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK

4	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Rp. 10.041.087.000
		Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	
TOTAL ANGGARAN				Rp. 10.041.087.000

NO	SASARAN KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN				
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Ditjen Gakkum LHK	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Rp. 46.902.823.000
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Perkantoran	
			Layanan Sarana Internal	
TOTAL ANGGARAN				Rp. 46.902.823.000

B. TARGET KINERJA PER UNIT KERJA TAHUN 2024

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara

SEKSI WILAYAH I

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	55 Badan Usaha

Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara dinyatakan lengkap	13 Perkara
---	---	---	------------

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK

3	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
		Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	5 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	5 Operasi

SEKSI WILAYAH II

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara

Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi

2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	55 Badan Usaha
---	--	--	----------------

Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara dinyatakan lengkap	14 Perkara
---	---	---	------------

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK

4	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
		Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	5 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	5 Operasi

SEKSI WILAYAH III

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
-----	------------------	----------------------------	-------------

1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	14 Badan Usaha
Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara dinyatakan lengkap	13 Perkara
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN			
Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK			
3	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
		Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	5 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	5 Operasi

SUB BAGIAN TATA USAHA

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Ditjen Gakkum LHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	95,53 Poin

LAMPIRAN



FIGHT AGAINST
X-CRIME



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taquiuddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Taquiuddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740628 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024
1	Pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	15 Operasi
			Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	15 Operasi
			Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang
2	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara
3	Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	124 Badan Usaha
4	Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	40 Perkara
5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen penegakan hukum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	95,53 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	15 Operasi	Rp7.198.956.000,00
	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	15 Operasi	Rp6.099.303.000,00
DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	Rp200.000.000,00
QCE-Penanganan Perkara	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	2 Perkara	Rp580.000.000,00
QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	124 Badan Usaha	Rp3.157.140.000,00
QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	40 Perkara	Rp10.634.090.000,00
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	95,53 Poin	Rp1.700.000.000,00
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp35.754.700.000,00
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1 Unit	Rp3.521.700.000,00
Total Anggaran			Rp70.991.050.000,00

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



[Handwritten signature]

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



[Handwritten signature]

Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740628 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ardhi Yusuf, S.Hut., M.Agr.
Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Taqiuddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah I
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Dr. Ardhi Yusuf, S.Hut., M.Agr.
NIP 19691115 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKSI WILAYAH I

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1.	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	5 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	5 Operasi
		Jumlah Polhut yang akan ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
2.	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	55 Badan Usaha
3.	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	13 Perkara

Pihak Kedua,

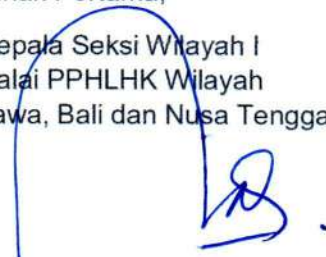
Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah I
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Dr. Ardhi Yusuf, S.Hut., M.Agr.
NIP 19691115 199703 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Mardiyanto, S.H., M.Sc.
Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Taquiuddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024


Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara


Taquiuddin, S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah II
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara


Agus Mardiyanto, S.Hut., M.Sc.
NIP 19721129 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKSI WILAYAH II

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1.	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	5 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	5 Operasi
		Jumlah Polhut yang akan ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
2.	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara
3.	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	55 Badan Usaha
4.	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	14 Perkara

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah II
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Agus Mardiyanto, S.Hut., M.Sc.
NIP 19721129 199903 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fachruddin Desi, SH., MH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Taquiuddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Taquiuddin, S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Fachruddin Desi, SH., MH
NIP 19751217 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SUB BAGIAN TATA USAHA

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	95,53 Poin

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Taqiuddin, S.Hut., M.P
19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Fachruddin Desi, SH., MH
NIP 19751217 200003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suparman S.P
Jabatan : Kepala Seksi Wilayah III
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Taqiuddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

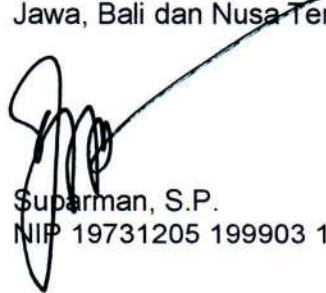
Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara


Taqiuddin S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah III
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara


Suparman, S.P.
NIP 19731205 199903 1 001

SEKSI WILAYAH III

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1.	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	5 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	5 Operasi
		Jumlah Polhut yang akan ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
2.	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	14 Badan Usaha
3.	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	13 Perkara

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah III
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Suparman, S.P.
NIP 19731205 199903 1 001



2024

RENCANA AKSI

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Disamping itu, dokumen Rencana Aksi ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang memuat tujuan, sasaran dan jadwal secara terkoordinasi serta prognosis per-Triwulan di Tahun 2024 lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Disamping itu, rencana aksi ini disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

Melalui penyusunan Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai pada tahun 2024 lebih terencana, terarah, efisien, efektif serta dapat mencapai target output yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara tahun 2023 ini masih belum sempurna, untuk itu saran yang membangun sangat diharapkan, sehingga penyusunan Rencana Aksi selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Sidoarjo, Januari 2024

Kepala Balai,



Taqiuddin, S.Hut., M.P

NIP.19740628 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.I. Maksud dan Tujuan	1
I.II. Landasan Hukum	2
BAB II	3
RENCANA AKSI	3
BAB III	8
PENUTUP	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Kegiatan, Indikator, Target Program Kualitas Lingkungan Hidup.....	3
Tabel 2 Rincian Kegiatan, Indikator, Target Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.....	4
Tabel 3 Rincian Kegiatan, Indikator, Target Program Dukungan Manajemen.....	4
Tabel 4 Rincian Kegiatan BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024	5

BAB I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024 adalah dokumen rencana aksi tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali Nusa dan Tenggara yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan.

Pada tahun anggaran 2024 BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara mendukung pelaksanaan dari 3 (tiga) program yang dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tiga program tersebut yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Dari 3 (tiga) program tersebut, terdapat 2 (dua) program yang merupakan prioritas nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, penjabaran kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

I.I. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Aksi TA 2023 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Selain itu renaksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan dan juga target yang harus dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Dengan adanya peta jalan tersebut akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran. Selanjutnya, dengan adanya rencana aksi ini dapat memudahkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang efektif, efisien dan akuntabel.

I.II. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024 ini dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang ada, yaitu :

- Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
- Keputusan Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.

BAB II. RENCANA AKSI

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara pada tahun 2024, telah ditetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) program KLHK yang diamanatkan untuk dilaksanakan. Program tersebut adalah Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Dari 3 (tiga) program tersebut, dua diantaranya adalah program prioritas nasional yaitu : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. Selain itu, pada tahun 2024 BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara diamanatkan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dari Program Kualitas Lingkungan Hidup, 1 (satu) kegiatan dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan 1 (satu) kegiatan dari Program Dukungan Manajemen. Rincian kegiatan, indikator kegiatan serta target dari BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rincian Kegiatan, Indikator, Target Program Kualitas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	ALOKASI ANGGARAN
Program: Kualitas Lingkungan Hidup				
Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				
1.	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 perkara	Rp. 580.000.000
Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				
2.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang- undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	124 Badan Usaha	Rp. 3.546.240.000
Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
3.	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara dinyatakan lengkap	40 Perkara	Rp. 9.920.900.000

Tabel 2 Rincian Kegiatan, Indikator, Target Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK				
1.	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	Rp. 10.041.087.000
		Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	15 Operasi	
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	15 Operasi	

Tabel 3 Rincian Kegiatan, Indikator, Target Program Dukungan Manajemen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
Program: Dukungan Manajemen				
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Ditjen Gakkum LHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	95,53 poin	Rp. 46.902.823.000

Detil rincian kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kegiatan sampai dengan rincian output dan lokasi dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4 Rincian Kegiatan BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
Program: Kualitas Lingkungan Hidup							
Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup							
1	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	051. Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	2 perkara	Rp. 580.000.000
					052. Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat		
					053. Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan		
Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi							
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan usaha yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan	051. Penanganan Pengaduan Perusahaan	124 Badan Usaha	Rp. 3.546.240.000
					052. Penanganan Pengaduan Non-Perusahaan		
					053. Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	051. Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	40 Perkara	Rp. 9.920.900.000
					052. Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK		
					053. Pra peradilan Kasus Tindak Pidana LHK		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
					054. Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
					055. Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan		
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							
Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK							
4	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	051. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	Rp. 10.041.087.000
		Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	051. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	15 Operasi	
					052. Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan		
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	051. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	15 Operasi		
				052. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan			
		Program: Dukungan Manajemen					
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Ditjen	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Layanan Dukungan	Layanan Umum	053. Layanan Dukungan Manajemen Satker	95.53 Poin	Rp. 46.902.823.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
	Gakkum LHK		Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	001. Gaji dan tunjangan		
					002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	051. Pengadaan Kendaraan Bermotor		
					052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data		
					053. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		
					054. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		

BAB III. PENUTUP

Tercapainya sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2023 tidak lepas dari dukungan Seksi-Seksi Wilayah dan Pos-Pos Penegakan Hukum yang berada di tingkat tapak. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program yang diemban oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program dan sasaran kegiatan yang sebaik- baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan kegiatan, program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 1 – MATRIK RENCANA AKSI BPPHLHK WILAYAH JABALNUSRA TRIWULANAN TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan Pendukung		Anggaran/ Pagu	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Target Output Triwulan			
				KRO	RO				B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan usaha yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan	Rp. 3.546.240.000	Perusahaan	124	14	48	48	14
2	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Rp. 9.920.900.000	Perkara	40	5	10	10	15
3	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Rp. 10.041.087.000	Operasi	15	4	5	5	1
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar			Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal		Operasi	15	4	5	5	1
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya			Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya		Orang	15	0	8	7	0
4	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	Rp. 580.000.000	Perkara	2	0	0	1	1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan Pendukung		Anggaran/ Pagu	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Target Output Triwulan			
				KRO	RO				B03	B06	B09	B12
	dan di luar pengadilan	pengadilan										
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien Ditjen Gakkum LHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum Layanan Perkantoran	Rp. 46.902.823.000	Poin	95.53	50	65	85	95.53
				Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal							


Sidoarjo, Januari 2024
Kepala Balai,

Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP.19740628 199903 1 002

TABEL 2 – MATRIK RENCANA AKSI BPPHLHK WILAYAH JABALNUSRA PER-BULAN TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan Pendukung		Anggaran/Pagu	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan											
				KRO	RO				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan usaha yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan	Rp. 3.546.240.000	Perusahaan	124	0	7	7	16	16	16	16	16	16	8	3	3
2	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Rp. 9.920.900.000	Perkara	40	2	2	6	2	2	1	3	3	4	5	5	5
3	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Rp. 10.041.087.000	Operasi	15	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	0	0
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar			Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal			15	0	2	2	2	1	2	2	2	1	1	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan Pendukung		Anggaran/Pagu	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan											
				KRO	RO				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya		Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya		Orang	15	0	0	0	2	3	3	2	2	3	0	0	0
4	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	Rp. 580.000.000	Perkara	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien Ditjen Gakkum LHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Rp. 46.902.823.000	Poin	95.53	10	25	50	55	60	65	75	80	85	90	92	95.53
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Perkantoran																
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal																

Sidoarjo, Januari 2024
Kepala Balai,


Taquiuddin, S.Hut., M.P
NIP.19740628 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ardhi Yusuf, S.Hut., M.Agr

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Dr. Ardhi Yusuf, S.Hut., M.Agr
NIP 19691115 19973 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024
1	Pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	15 Operasi
			Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	15 Operasi
			Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang
2	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara
3	Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	124 Badan Usaha
4	Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	40 Perkara
5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen penegakan hukum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	95,53 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	15 Operasi	Rp4.137.383.000,00
	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	15 Operasi	Rp4.145.090.000,00
DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	Rp200.000.000,00
QCE-Penanganan Perkara	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	2 Perkara	Rp780.000.000,00
QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	124 Badan Usaha	Rp3.221.240.000,00
QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	40 Perkara	Rp9.620.900.000,00
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	95,53 Poin	Rp1.900.000.000,00
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp33.783.837.000,00
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1 Unit	Rp12.802.600.000,00
Total Anggaran			Rp70.591.050.000,00

Jakarta, 30 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Dr. Ardhi Yusuf, S.Hut., M.Agr
NIP. 19691115 19973 1 006